

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Volume 11 | Nomor 1 | Juni 2020

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Pelindung : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

Pengarah : Muhammad sai, MA

Penanggung jawab : Dr. Emawati, M.Ag

Ketua Penyunting : Zaenudin Amrulloh, M.A.

Mitra Bestari :1. Dr. Nazar Naamy, M.Si (UIN Mataram)
2. Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph. D (UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Vina Salviana DS, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)
4. Danang Arif Darmawan, M.Si (Universitas Gadjah Mada)
5. Dr. Slamet Mulyono, M.Si (UIN Sunan Ampel)

Dewan Penyunting :1. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag
2. Dr. Muchammadun, MM
3. Abdul Najib, M.Si
4. Budiman, M.Sc
5. Novia Suhastini, M.Si
6. Riska Mutiah, M.Si

Lay-Outer : Fuad Hasan, A.Md

Tata Usaha : Ahmad Khatibul Umam, S.Pd

Alamat

Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337
Email: journalkomunitas@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

POTENSI DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAHAN GAMBUT: Studi Pendekatan Kehidupan berkelanjutan di
Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Dumai
Iwed Mulyani ~ 1

TINDAKAN SOSIAL KADER TB CARE DALAM MENANGGULANGI
PENYAKIT TB DI KOTA MALANG
Siti Aminah ~ 19

MODEL KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI-PERUSAHAAN
DAN PEMERINTAH DALAM BINGKAI *COOPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*
Ahmad Kharis, Saipullah Hasan ~ 39

SIARAN LAYANAN PUBLIK RADIO MAYANGKARA FM KOTA
BLITAR
Rendi Panju ~ 59

DINAMIKA GERAKAN SOSIAL DALAM
MENENTANG PEMBUANGAN LIMBAH
PABRIK KULIT
Awan Setia Dharmawan ~ 78

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh	
ب: b	ف: f	
ت : t	ق: q	
ث : ts	ك : k	
ج : j	ل : l	
ح : h	م : m	
خ : kh	ن : n	
د : d	و : w	
ذ : dz	هـ : h	
ر : r	ء : ' (glide)	
ز : z	ي : y	
س : s	Untuk mad dan diftong	
ش : sy	ا : â	
ص : sh	ي : û	
ض : dh	و : û	
ط : th	أو : au	
ظ : zh	أي : ai	
ع :		

POTENSI DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LAHAN GAMBUT:

Studi Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kelurahan Tanjung
Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

Iwed Mulyani

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai

mulyaniwed@gmail.com

Abstrak: Indonesia merupakan Negara dengan luas lahan gambut tropika terbesar di Dunia. Provinsi Riau menjadi provinsi yang memiliki lahan gambut terluas (3,8 juta hektar) di Indonesia. Selain memiliki lahan terluas, Provinsi Riau juga penyumbang kebakaran lahan gambut terbesar nomer dua (53.034 hektar) setelah Kalimantan dengan Kota Dumai sebagai wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi (15 kasus). *Trend* penanganan permasalahan tersebut mulai melibatkan stakeholder terkait, bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun masyarakat saja bahkan juga pihak swasta. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menganalisis potensi yang ada di lahan gambut menggunakan analisis penghidupan berkelanjutan guna memberikan rekomendasi program yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu penelitian ini akan melihat bagaimana analisis penghidupan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan PT Pertamina RU II Dumai dalam memberikan rekomendasi program pemberdayaan masyarakat lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini memberikan tiga rekomendasi program yaitu pemanfaatan lahan gambut dengan melibatkan Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri, perbaikan infrastruktur jalan RT 12 Kelurahan Tanjung Palas, dan perbaikan sanitasi dan penyuluhan PHBS.

(Abstract: *Indonesia is a country with the largest area of tropical peatland land in the world. Riau Province has the largest peatland area (3.8 million hectares) in Indonesia. Besides having the largest land area, Riau Province is also the second-largest contributor to peatland fires (53,034 hectares) after Kalimantan with Dumai City as the region with the highest fire cases (15 cases). The trend in handling these problems has begun to involve relevant stakeholders, not just the responsibility of the government or the community, even the private sektor. One of the strategies undertaken is to analyze the potential that exists in peatlands using a continuous analysis to provide program recommendations that can solve this problem. Therefore this research will look at how the analysis of sustainable livelihoods conducted by PT Pertamina RU II Dumai company in providing recommendations for peatland community empowerment programs. This study uses qualitative research methods with data collection techniques using interviews, observation and documentation studies. The results of this study provide three program recommendations, namely the use of peatlands whit involving the Paman Jaya Mandiri Farmer Group, the*



Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/>) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as spesified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

improvement of the RT 12 RT toll road infrastructure, and the improvement of sanitation and PHBS counselingh)

Keywords: ***Sustainable Livelihoods, Social Responsibility, Empowerment Programs.***

A. Latar Belakang

Indonesia(17,2 juta ha) merupakan negara dengan kepemilikan lahan gambut terbesar keempat dunia di bawah Kanada(170 juta ha), Rusia(150 juta ha), dan Amerika Serikat (40 juta ha)¹. Akan tetapi, 50% lahan gambut tropika dunia ada di Indonesia. Gambut tropika merupakan lahan gambut yang berada di sebuah wilayah dengan iklim tropis, memiliki ciri kadar keasaman yang tinggi, terdapat beberapa senyawa yang kandungannya tinggi seperti lignin dan fenolat, selain itu karakteristik tanah tidak terlalu cocok untuk dilakukan kegiatan pertanian².

Perbedaan lahan gambut baik tropika ataupun bukan dengan tanah mineral umumnya adalah: 1) mudah mengalami kering tak balik (*irreversible drying*), 2) mudah ambles(subsidence), 3) rendahnya daya dukung(*bearing capacity*), 4) rendahnya kandungan hara kimia dan kesuburan(*nutrient*), dan 5) terbatasnya jumlah mikro organisme³. Masyarakat Indonesia berusaha memaksimalkan beberapa lahan tipe ini, seperti pertanian, perkebunan monokultur, lahan pemukiman atau sarana lainnya⁴. Penyebab pemanfaatan lahan gambut adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli lahan cukup rendah dibanding jika membeli lahan mineral pada umumnya.

Pemanfaatan lahan tersebut bahkan terindikasi akan terus meningkat, data menunjukkan pertumbuhan pemanfaatan lahan gambut pada 2016 sebesar 40 % dan akan menjadi 60 % pada tahun 2030⁵. Pemanfaatan lahan tersebut sebenarnya tidak melanggar peraturan karena memang dilindungi oleh peraturan pemerintah. Saat ini di Indonesia terdapat 80 % lahan gambut budidaya dan 20% lahan gambut hutan lindung atau hutan konservasi. Selama kegiatan pemanfaatan dilakukan pada

¹ Sri Najiyati, Agus Asmana, and I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands Internasional, 2005), p. 8.

² Ai Dariah and Maftuha, *Karakteristik Lahan Gambut*, pp. 16–25.

³ Muhammad Noor, Masganti Masganti, and Fahmuddin Agus, *Pembentukan Dan Karakteristik Gambut Tropika Indonesia*, 2018, p. 14.

⁴ Susan Lusiana, *Lahan Gambut Dan Drainability Limit* (Bogor, 2019), p. 1.

⁵ Kate Evans, 'Kelapa Sawit: Meningkatnya Ekspansi Petani Ke Kahan Gambut', *Https://Forestsnews.Cifor.Org/*, 2019 <<https://forestsnews.cifor.org/59857/kelapa-sawit-meningkatnya-ekspansi-petani-ke-lahan-gambut?fnl=id>> [accessed 11 March 2020].

lahan gambut budidaya maka kegiatan tersebut tidak melanggar hukum⁶. Pemanfaatana lahan gambut bahkan dianjurkan oleh beberapa penelitian dengan melihat potensi yang ada. Seperti pemanfaatan potensi lahan gambut menjadi lahan pembibitan karet⁷ dan pemanfaatan lahan gambut dangkal untuk lokasi pertanian⁸.

Pemanfaatan lahan gambut perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik gambut serta menggunakan teknologi tepat guna⁹. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berakibat fatal. Salah satu contoh yang bisa dijadikan pelajaran adalah kegagalan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar yang dikritik oleh banyak pihak¹⁰. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1) tidak melakukan prosedur baku dalam perencanaan dan pengembangan rawa, 2) penyeragaman kondisi lahan, 3) keterbatasan data dasar, 4) kurangnya pemahaman terhadap kondisi sosial setempat, dan 5) tidak belajar dari pengembangan lahan sebelumnya.

Persebaran Lahan gambut di Indonesia antara lain terdapat di Sumatera dengan luas 6,4 juta hektar(43%), Kalimantan dengan luas 4,7 juta hektar(32%) dan Papua dengan luas 3,6 juta hektar(25%)¹¹. Secara spesifik persebaran lahan gambut di pulau Sumatera tertinggi ada di Provinsi Riau sebesar 3,8 juta hektar jika dilihat luas wilayah gambut di Provinsi Riau lebih besar dari luas wilayah gambut yang berada di Papua.

Provinsi Riau memiliki 10 Kabupaten, 2 Kota, 169 Kecamatan, dan 1875 Desa/Kelurahan yang tersebar di dalam 8,7 juta hektar luas wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 6.971.750 jiwa¹². 8,7 juta hektar tersebut 7,1 juta hektar merupakan hutan dan 3,8 juta hektar diantaranya adalah lahan gambut¹³.

⁶ GAPKI, 'Sawit Tanaman Realistis Di Lahan Gambut', <https://Gapki.Id/>, 2017 <<https://gapki.id/news/1622/sawit-tanaman-realistic-di-lahan-gambut>> [accessed 11 March 2020].

⁷ Andi N. Cahyo and J Sapura, 'Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Tanaman Karet (*Hevea Brasiliensis*)', in *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014* (Palembang, 2014), pp. 341–48.

⁸ Masganti Masganti, Khairil Anwar, and Maulia Aries Susanti, 'Potensi Dan Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal Untuk Pertanian', *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 11.1 (2017), 43–52 <<https://doi.org/10.2017/jsdl.v11n1.2017.%p>>.

⁹ Supiandi Sabiham and Sukarman, 'Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia', *Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia*, 6.2 (2012) <<https://doi.org/10.2018/jsdl.v6i2.6389>>.

¹⁰ Didi Ardi Suriadikarta, *Pembelajaran Dari Kegagalan Penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengolahan Lahan Gambut Berkelanjutan, Pengembangan Inovasi Pertanian* (Bogor, 2009), II.

¹¹ Sukarman, *Pembentukan Sebaran Dan Kesesuaian Lahan Gambut Indonesia*, 2015.

¹² BPS Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka* (Riau, 2020).

¹³ INCAS, 'Riau', [Http://Incas.Menlhk.Go.Id/](http://Incas.Menlhk.Go.Id/), 2015 <<http://incas.menlhk.go.id/id/data/riau/>>.

Beberapa waktu lalu isu kebakaran hutan dan lahan menjadi trending di dunia karena perubahan iklim yang cukup ekstrim, Provinsi Riau cukup menjadi sorotan baik di kancah lokal maupun internasional¹⁴. Data menunjukkan pada tahun 2019 Provinsi Riau menyumbang 90.233 hektar luas kebakaran hutan dan lahan, 53.034 hektar diantaranya merupakan lahan gambut¹⁵. Kebakaran lahan gambut di Riau menjadi jumlah kebakaran tertinggi nomor dua setelah Kalimantan Tengah (75.951 hektar). Menariknya, data kejadian bencana alam di Provinsi Riau untuk kebakaran hutan dan lahan tertinggi ada di Kota Dumai berjumlah 15 kasus¹⁶.

Kota Dumai terdiri dari 7 Kecamatan (Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan, Dumai Timur, Dumai Kota) dan 33 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 1.727,38 km²¹⁷. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi ada di wilayah Kecamatan Dumai Timur sebesar 64.127 jiwa terbagi kedalam 5 kelurahan yaitu Tanjung Palas, Jaya Mukti, Teluk Binjau, Buluh Kasap, dan Bukit Batrem¹⁸.

Kota Dumai memiliki sebuah kilang minyak pertama di Indonesia yang saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pertamina (Perseor) RU II Dumai. Selain melakukan pengolahan minyak perusahaan juga memberikan perhatian kepada isu-isu sosial lingkungan yang berkembang belakangan. Isu kebakaran lahan gambut menjadi perhatian perusahaan. Data sebelumnya menunjukkan bahwa Kota Dumai merupakan kota dengan tingkat kejadian kebakaran tertinggi diantara kota/kabupaten di Provinsi Riau. Hal ini menjadikan perusahaan tergerak untuk merumuskan sebuah program yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

PT Pertamina (Persero) RU II Dumai melakukan observasi dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada. Hasil observasi menunjukkan bahwa luas wilayah terbakar hingga maret 2020 sebesar 68,3 Ha dan Kelurahan Tanjung Palas merupakan salah satu kelurahan dengan lahan terbakar seluas 2 Ha. Berdasarkan observasi awal sebenarnya Kelurahan Tanjung Palas memiliki potensi Kelompok Tani Paman Jaya yang beranggotakan 30 orang dengan potensi komoditas nanas, kopi, sereh wangi dan matoa. Selain itu masyarakat di sana juga menginisiasi untuk pembentukan

¹⁴ Banda Haruddin Tanjung, 'Malaysia Dan Singapura Ancam Indonesia Terkait Kebakaran Hutan', <https://news.okezone.com/>, 2016 <<https://news.okezone.com/read/2016/07/01/340/1430511/malaysia-dan-singapura-ancam-indonesia-terkait-kebakaran-hutan>>.

¹⁵ KLHK, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan*, 2019.

¹⁶ BPS Provinsi Riau.

¹⁷ BPS Kota Dumai, *Kota Dumai Dalam Angka* (Kota Dumai, 2020).

¹⁸ BPS Kota Dumai, *Kecamatan Dumai Timur Dalam Angka 2019* (Kota Dumai, 2019).

Masyarakat Peduli Api(MPA)¹⁹. Akan tetapi, potensi tersebut juga dibarengi dengan masalah yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain minimnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut dan belum memadainya akses jalan menuju wilayah tersebut. Maka dari itu, melihat potensi yang ada dan permasalahan yang dihadapi, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana potensi yang ada di masyarakat dapat dimaksimalkan dengan menggunakan pendekatan kehidupan berkelanjutan?. Manfaat dan tujuan penelitian ini adalah guna melihat potensi yang ada menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan agar dapat dijadikan peluang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Program pemberdayaan masyarakat seyogyanya melalui tahapan yang saling berkaitan. Idealnya langkah pertama dalam melaksanakan program pemberdayaan adalah melakukan observasi atau *assessment* guna melihat potensi yang ada di masyarakat. Istilah yang sering digunakan dalam tahapan ini adalah pemetaan sosial atau *sosial mapping*. Pentingnya pemetaan sosial kerap digunakan salah satunya dalam merencanakan program pengembangan ekowisata berkelanjutan²⁰. Hasil penelitian dijadikan sebagai referensi untuk merancang pengembangan program pariwisata berkelanjutan di Citarum Hulu. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pemetaan sosial salah satunya menggunakan perspektif penghidupan berkelanjutan. Pemetaan sosial yang dilakukan guna melihat kearifan lokal petani kelapa di Desa Apulea menyimpulkan bahwa modal sumber daya alam dan modal sosial dapat dijadikan sebagai asset mempertahankan hidup di tengah hambatan yang ada²¹.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan secara spesifik pendekatan penghidupan berkelanjutan sebagai pisau analisisnya. Penelitian yang dilakukan guna memetakan asset petani dalam mengelola hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul, menghasilkan bahwa asset prioritas yang digunakan antara lain adalah sumber daya manusia, sosial, sumber daya alam, fisik dan finansial²². Penelitian sejenis lainnya dalam melihat strategi penghidupan berkelanjutan

¹⁹ Wawancara dengan R. Zamzam, 05/02/2020

²⁰ Oekan S Abdoellah and others, 'Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2019), 59 <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.24461>>.

²¹ Yosafat Kotalaha and Gatot Sasongko, 'Kearifan Lokal "Makiriwo" Dalam Perspektif Sustainable Livelihood (Studi Kasus Petani Kelapa Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara)', *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6.3 (2018), 256–62.

²² Silvi Nur Oktalina, San Afri Awang, and Slamet Hartono, 'Pemetaan Aset Penghidupan Petani Dalam Mengelola Hutan Rakyat Di Kabupaten Gunungkidul', *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23.1 (2016), 58–65.

masyarakat di kawasan lahan kering Desa Karangpatihan, menyimpulkan bahwa modal penghidupan yang dimiliki oleh setiap wilayah penelitian rendah²³.

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya antara lain adalah pendekatan penghidupan berkelanjutan yang dijadikan sebagai pisau analisis oleh penelitian kali ini. Perbedaannya adalah pertama, pemilihan lokasi penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian kali ini. Kedua, penelitian terdahulu hanya menceritakan potensi dan kendala yang ada di wilayah tersebut tanpa menyertakan rekomendasi program yang ditawarkan. Ketiga, penelitian kali ini melibatkan peran aktif perusahaan PT Pertamina(Persero) RU II Dumai dalam menyusun rekomendasi program yang tepat sasaran.

Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan sebagai Media Penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Lahan Gambut

Islam memiliki dua sumber yang selalu dijadikan rujukan dalam berbagai permasalahan. Sudah sewajarnya umat muslim memberikan pandangan terkait permasalahan yang dihadapi saat ini menggunakan prespektif kedua sumber tersebut. Permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat adalah permasalahan lingkungan. Cukup banyak tertulis di dalam Al-Qur'an mengenai permasalahan ini. Antara lain Al-Baqarah(2) 6, Al-A'raf(7) 56-58, Ar-Rum (30): 41-42 dan masih banyak lainnya. Salah satu ayat yang menarik untuk diperhatikan adalah surat Ar-Rum(30) ayat 41-42, Al-Qur'an menceritakan bahwa kerusakan yang muncul di dunia ini disebabkan oleh tangan manusia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah ulah manusia yang akibatnya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri.

Salah satu contohnya adalah kebakaran lahan yang polusinya mencemari udara dan mengganggu makhluk hidup lain yang berada di sekitarnya. Beberapa temuan lapangan mengindikasikan bahwa kebakaran yang terjadi sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim, akan tetapi terdapat bukti-bukti yang mengindikasikan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh manusia. Kesengajaan ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembukaan lahan. Membakar lahan adalah cara yang efektif dan relatif murah dari pada harus mengikuti standar prosedur yang ada. Maka banyak masyarakat bahkan korporasi besar yang menggunakan cara ini dalam membuka lahan yang nantinya akan dialihfungsikan sebagai lahan pertanian.

²³ Rathna Wijayanti, M. Baiquni, and Rika Harini, 'Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset Di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4.2 (2016), 133 <<https://doi.org/10.14710/jwl.4.2.133-152>>.

Menyikapi fenomena tersebut, perlu adanya pemetaan sosial setiap wilayah yang berpotensi terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengetahui sedini mungkin potensi yang ada di masyarakat untuk dimanfaatkan dan menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan yang tepat sasaran. Agar potensi yang ada dapat dijadikan kekuatan dalam meminimalisir terjadinya kebakaran lahan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pemetaan sosial yaitu menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. *Sustainable livelihood approach* merupakan pendekatan yang mengidentifikasi modal-Modal atau asset yang dimiliki oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. *Sustainable livelihood* merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu *sustainable* yang berarti berkelanjutan dan *livelihood* yang berarti penghidupan meliputi alam, manusia, finansial, sosial dan fisik²⁴.

Departement for International Development (DFID) mengelompokkan modal-Modal atau asset tersebut menjadi lima asset atau biasa dikenal dengan istilah pentagon asset²⁵. Lima asset yang digunakan untuk penghidupan berkelanjutan yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya fisik dan sumber daya sosial. Penjabaran setiap kategori yang dimaksud antara lain: *pertama*, asset sumber daya manusia adalah segala macam potensi yang dimiliki oleh individu masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, kapasitas untuk bekerja dan kapasitas untuk beradaptasi. *Kedua*, asset sumber daya alam adalah segala macam potensi alam yang ada di wilayah tempat tinggal masyarakat seperti tanah dan produksinya, air dan sumber daya air di dalamnya, pohon dan hasil hutan, binatang ternak, keanekaragaman hayati, dan segala macam yang berhubungan dengan lingkungan.

Ketiga, asset sumber daya finansial adalah potensi keuangan yang dimiliki oleh individu masyarakat seperti tabungan atau simpanan, dana pensiun, keuntungan usaha, upah atau gaji. *Keempat*, asset sumber daya fisik adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa teknologi ataupun infrastruktur seperti alat-alat produksi, teknologi tradisional, jaringan transportasi, gedung kesehatan maupun pendidikan, sarana kebersihan, jaringan komunikasi, hingga kondisi jalan di sebuah wilayah. *Kelima*, asset sumber daya sosial adalah potensi yang dimiliki oleh

²⁴ Sebastian Saragih, Jonatan Lassa, and Afan Ramli, *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan*, 2007.

²⁵ Anonim, *Sustainable Livelihoods Guidance Sheet* (London: Department for International Development (DFID), 1999).

masyarakat berupa jaringan dan koneksi, kerukunan antar tetangga, hubungan baik dengan teman serta terbentuknya kelompok formal maupun non formal.

Kerangka kerja *sustainability livelihood* berasal dari sebuah kerentanan yang ada di masyarakat baik berupa kerentanan yang berasal dari *shocks*(kejutan), *trends*(kecenderungan), and *seasonality*(musiman)²⁶. Keseluruhan kerentanan tersebut di analisis menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Kemudian menghasilkan sebuah luaran program yang dapat menjawab kerentanan tersebut dengan melihat asset yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam penelitian ini luaran yang dihasilkan berupa sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan yang merujuk pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial-budaya meningkat²⁷. Selain itu pemberdayaan juga berarti sebuah proses yang didesain atau dirancang untuk menciptakan perubahan dalam aspek ekonomi maupun sosial melalui partisipasi aktif setiap individu masyarakat. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis kerentanan yang dihadapi masyarakat Kelurahan Tanjung Palas untuk kemudian di analisis menggunakan pendekatan kehidupan berkelanjutan dan menghasilkan rekomendasi program pemberdayaan masyarakat yang dapat dijadikan rujukan bagi perusahaan.

Metode

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Januari hingga Maret tahun 2020. Lokasi penelitian di wilayah RT 12 secara spesifik dan Kelurahan Tanjung Palas secara umum, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Objek penelitian ini adalah RT 12 Kelurahan Tanjung Palas dengan subyek penelitian merupakan masyarakat RT 12 secara khusus dan Kelurahan Tanjung Palas secara umum sebagai wilayah yang dilihat potensinya menggunakan kacamata penghidupan berkelanjutan dan perwakilan dari perusahaan PT Pertamina (Persero) RU II Dumai²⁸. Subyek dalam penelitian ini adalah Didi Ardian sebagai *Communication and Relation* (Comrel) Officer Pertamina, Isa Elfianto sebagai CD Officer atau bisa disebut pendamping masyarakat, Rifki Zamzam sebagai Bendahara Kelompok Paman Jaya dan Sa'ad Perwakilan Masyarakat RT 12 Kelurahan Tanjung Palas.

²⁶ Sunaji Zamroni and others, *Desa Mengembangkan Kehidupan Berkelanjutan* (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2015).

²⁷ ST Raharjo, *CSR: Relasi Dinamis Antara Perusahaan Multinasional Dengan Masyarakat Lokal* (Semarang: Unpad Press, 2015).

²⁸ Suwardi and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka, 2008).

Penarikan sampling penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan menggabungkan teknik bola salju sehingga sampel yang diperoleh memiliki kriteria tertentu. Dalam penelitian ini pertama kali peneliti bertemu dengan perwakilan perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada program ini dalam hal ini peneliti bertemu dengan Didi Ardian. Tahapan ini bertujuan untuk mencari data yang dibutuhkan serta meminta nama subyek penelitian lainnya yang memahami program secara menyeluruh. Akhirnya peneliti diarahkan untuk bertemu dengan Isa Elfianto sebagai pendamping program akhirnya bertemu langsung dengan masyarakat antara lain Rifki Zamzam sebagai Bendahara Kelompok Paman Jaya Mandiri dan Sa'ad Perwakilan Masyarakat RT 12 Kelurahan Tanjung Palas. Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi²⁹. Wawancara dilakukan kepada subyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat kondisi Kelurahan Tanjung Palas lebih spesifik RT 12. Studi dokumentasi dilakukan bertujuan untuk melihat letak administrasi Kelurahan Tanjung Palas dan mencari data penunjang dalam penelitian. Salah satu sumber dokumentasi adalah data pemetaan sosial yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini akan menggabungkan data tersebut dengan keadaan lapangan khususnya wilayah RT 12 Kelurahan Tanjung Palas. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi dan perpanjangan keterlibatan penelitian dan analisis data menggunakan analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan³⁰.

B. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan program tanggung jawab sosial perusahaan saat ini mulai menunjukkan perubahan. Dana program tanggung jawab sosial yang berjenis pemberdayaan masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya, selain itu dana yang berjenis pemberian semata atau karitatif *trend*-nya semakin mengalami penurunan³¹. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian perusahaan terhadap lingkungan sekitar semakin besar³². Langkah awal yang harus dilakukan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik adalah melakukan pemetaan sosial, kegiatan ini dilakukan sebagai dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan

²⁹ Suwardi and Basrowi, p. 188.

³⁰ Lexy J Moeloeng, *Meotde Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010), pp. 324–28.

³¹ Erwinton Simatupang and Vandy Yoga Swara, 'Creating Shared Value Di Industri Migas: Pelajaran Dari Balongan Dalam Meminimalisir Pengangguran Dan Menekan Potensi Kecelakaan Kerja', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2.1 (2019), 63–86 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-04>>.

³² Rahadiyand Aditya, 'Analisis Penta Helix Dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratra Pada Tahun 2017', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>>.

program yang berbasiskan pada kebutuhan masyarakat bukan hanya pada keinginan masyarakat semata.

Kelurahan Tanjung Palas setidaknya termasuk dalam kelurahan yang heterogen, jika dilihat dari kesukuan yang ada di sana. Terdapat empat suku atau etnis yang bedomisili di wilayah tersebut, antara lain suku Melayu, Jawa, Batak dan Minang. Luas wilayah Kelurahan Tanjung Palas sebesar 26 km² atau sekitar 2600 hektar yang terbagi menjadi 13 RT dengan jumlah penduduk sebesar 7692 jiwa terdiri dari 1975 Kepala Keluarga. Presentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 52:48 dengan 65% diantaranya merupakan usia produktif³³. Meskipun hidup dengan berbagai macam latar kesukuan akan tetapi masyarakat Kelurahan Tanjung Palas tetap dapat hidup rukun dan berdampingan. Salah satu buktinya adalah tidak adanya konflik antar masyarakat yang timbul.

Kondisi sumber daya manusia yang berada di wilayah ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tanjung Palas. Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang berada di wilayah ini cukup variatif, tingkat pendidikan tertinggi yaitu lulusan SMA/ sederajat sebesar 36,43% dan terendah tamat S-1/ Sederajat sebesar 0,04%. Sedangkan tiga teratas mata pencaharian penduduk Tanjung Palas adalah pengangguran 57%, Karyawan Perusahaan Swasta 14% dan pengusaha atau wiraswasta 7%³⁴. Menjadi menarik untuk dijadikan kajian tersendiri jika ingin melihat mengapa terjadi korelasi yang positif antara tingkat pendidikan yang cukup tinggi dengan angka pengangguran. Dalam penelitian kali ini tidak akan membahas detail terkait hal tersebut.

Batas administrasi Kelurahan Tanjung Palas menurut arah mata angin antara lain sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buluh Kasap, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bukit Batrem, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mundam, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jaya Mukti. Kelurahan Tanjung Palas termasuk dalam wilayah operasional PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, tembok yang membatasi wilayah oprasional kilang bahkan bersebalahan langsung dengan pemukiman warga. Sebagai wilayah yang berdampak langsung dengan adanya oprasional perusahaan sudah selayaknya perusahaan memberikan perhatian terhadap keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

³³ SODEC, *Laporan Sosial Mapping Di Wilayah Pengembangan PT Pertamina RU II Dumai* (Yogyakarta, 2018), pp. 55–56.

³⁴ SODEC, pp. 57–58.

Salah satu RT yang menarik untuk dilihat adalah RT 12 yang memiliki dua wilayah yang berbeda, yaitu wilayah Paman Jaya dan wilayah Sripulau. Terdapat 9 kk dengan jumlah penduduk sebanyak 28 jiwa di wilayah Paman Jaya dan 70 kk di wilayah Sripulau. Letak yang tidak cukup strategis menyebabkan sedikit masyarakat yang berdomisili di wilayah Paman Jaya, meskipun demikian banyak masyarakat luar yang memanfaatkan lahan sebagai ladang pertanian. Luas wilayah RT 12 sebesar 400 hektar dengan potensi sebesar 300 hektar sebagai ladang pertanian³⁵.

Permasalahan atau bisa juga disebut dengan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu permasalahan personal dan permasalahan struktural. Mengetahui akar permasalahan ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam melakukan analisis penghidupan berkelanjutan. Dengan mengetahui jenis-jenis kerentanan dan sebab-sebab terjadinya permasalahan dapat dijadikan dasar dalam menyusun sebuah rekomendasi program. Penyusunan rekomendasi program juga mempertimbangkan lima potensi penghidupan berkelanjutan yang ada di masyarakat. Permasalahan ditinjau dari wilayah Kelurahan Tanjung Palas secara umum dan RT 12 secara khusus.

Permasalahan personal yang terjadi di Kelurahan Tanjung Palas antara lain kemiskinan, pengangguran, miras dan narkoba, perilaku hidup bersih dan sehat.³⁶ *Pertama*, faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan kemiskinan adalah kesadaran diri masyarakat dalam mencari pekerjaan alternatif yang cukup rendah dan sifat ketergantungan masyarakat dengan hanya mengandalkan bantuan dari perusahaan. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat faktor lain yang mendasari terjadinya kemiskinan. *Kedua*, faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pengangguran adalah rendahnya kesadaran diri yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencari pekerjaan yang tetap dan minimnya keinginan untuk membuka usah. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat penyebab lain. *Ketiga*, salah satu penyebab permasalahan miras dan narkoba adalah kemudahan dalam mengakses minuman keras, hal ini disebabkan letak wilayah yang berdekatan dengan pusat kota. *Keempat*, faktor penyebab permasalahan perilaku hidup bersih dan membuang sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Permasalahan struktural antara lain adalah konflik antara masyarakat, konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa, konflik antara masyarakat dengan perusahaan, dan disfungsi kelembagaan. Berdasarkan hasil pemetaan sosial konflik struktural tidak terlihat berpotensi meluas. 93% informan masyarakat tidak

³⁵ Wawancara dengan D. Ardian, 01/02/2020

³⁶ SODEC, pp. 265–69.

merasakan konflik antara tetangga, 76% informan masyarakat tidak merasakan konflik dengan pemerintah desa, dan 73% informan masyarakat tidak merasakan konflik dengan perusahaan³⁷.

Permasalahan atau kerentanan yang terjadi di wilayah RT 12 sedikit berbeda dengan terjadi di Kelurahan Tanjung Palas secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat ada 3 yaitu permasalahan *pertama*, kebakaran lahan gambut, *kedua*, permasalahan mobilitas hasil panen atau infrastruktur jalan. Seperti yang disampaikan oleh Zamzam³⁸ bahwa:

"Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat selama ini khususnya di RT 12 itu karena wilayah di sini sebagian besar merupakan wilayah gambut dangkal dan dalam, maka wilayah di sini sering terjadi kebakaran lahan. Permasalahan lainnya adalah jalan yang rusak, jalan yang dilalui masyarakat masih berupa jalan tanah dan jalan semen yang telah rusak parah."

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan pendamping masyarakat perusahaan. Menurut Elfianto selain dua permasalahan yang disampaikan oleh Zamzam, terdapat satu permasalahan lain yaitu permasalahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Elfianto³⁹ menyatakan bahwa:

"(kerentanan yang dialami masyarakat adalah) dari sektor alam itu kebakaran lahan gambut, dari sektor infrastruktur itu kesulitan akses mobilitas hasil panen dan dari sektor kesehatan itu kebersihan atau PHBS jadi hal yang perlu di perhatikan"

Untuk permasalahan terakhir, yaitu kerentanan di bidang kesehatan juga dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Palas secara umum. Hal ini tercantum dalam dokumen hasil pemetaan sosial perusahaan.

Jika digabungkan maka terdapat tiga kerentanan yang dirasakan oleh masyarakat RT 12 wilayah Paman Jaya. *Pertama*, kerentanan terhadap kebakaran lahan gambut. *Kedua*, kerentanan infrastruktur jalan yang rusak dan menghambat mobilitas hasil panen. *Ketiga*, rendahnya kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga kerentanan ini dapat dijadikan dasar oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, swasta ataupun lembaga non pemerintahan dalam menyusun program.

Analisis Penghidupan Berkelanjutan RT 12 Kelurahan Tanjung Palas

Secara teoritis pendekatan yang digunakan adalah analisis penghidupan berkelanjutan. Istilah yang kerap digunakan dalam menyebut kelima asset ini adalah pentagon asset. mengapa pentagon asset, karena terdapat lima model atau asset

³⁷ SODEC, pp. 274–77.

³⁸ Wawancara dengan R. Zamzam, 05/02/2020

³⁹ Wawancara dengan I. Elfianto. 03/02/2020

yang dianalisis dalam melihat potensi penghidupan berkelanjutan, antara lain adalah asset sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya fisik dan sumber daya sosial.

Asset Pertama adalah asset sumber daya manusia. Keadaan manusia dalam hal ini masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek seperti pendidikan formal, pendidikan non formal, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini tolak ukur yang digunakan adalah keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, dan status kesehatan. Potensi asset sumber daya manusia yang berada di RT 12 Kelurahan Tanjung Palas ditinjau dari aspek keterampilan yang dimiliki dan kesehatan menunjukkan hal yang cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara bahwa *pertama*, kesehatan masyarakat berada dalam kondisi baik. *Kedua*, masyarakat memiliki keterampilan guna menunjang pekerjaan sehari-harinya.

"Kesehatan masyarakat di RT 12 berada dalam kondisi baik, selain itu masyarakat juga memiliki keterampilan membuat olahan makanan seperti kue berbahan dasar hasil pertanian, kemampuan budidaya ikan air tawar, kemampuan pertanian dan kemampuan peternakan."⁴⁰

Pernyataan tersebut juga diperkuat dari pernyataan yang disampaikan oleh pendamping masyarakat perusahaan. Menyatakan bahwa masyarakat sekitar sudah dapat membuat olahan makanan berbahan dasar hasil memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

"masyarakat sudah memiliki kemampuan dalam pengelolaan lahan gambut dan beberapa warga sudah bisa mengolah makanan dari sumber daya alam atau hasil panen yang berada di sekita kediaman masyarakat."⁴¹

Asset sumber daya manusia yang dimiliki oleh RT 12 Kelurahan Tanjung Palas berada dalam keadaan cukup baik, bahkan masyarakat sudah memiliki kemampuan yang cukup spesifik. Beberapa kemampuan yang dimiliki adalah keterampilan membuat olahan makanan, budidaya perikanan air tawar, keterampilan dalam hal pertanian dan peternakan. Beberapa kemampuan ini perlu dipertimbangkan dalam melihat atau menyusun rekomendasi program pemberdayaan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Aset kedua adalah sumber daya alam. Secara teoritis terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam melihat asset sumber daya alam seperti tanah dan produksinya, air dan sumber daya air di dalamnya, pohon dan hasil hutan, binatang ternak, keanekaragaman hayati, dan segala macam yang berhubungan dengan

⁴⁰ Wawancara dengan R. Zamzam, 05/02/2020

⁴¹ Wawancara dengan I. Elfianto, 03/02/2020

lingkungan. Pada penelitian ini yang dilihat adalah kepemilikan lahan dan potensi pemanfaatan lahan yang ada di wilayah RT 12.

Kepemilikan lahan di masyarakat RT 12 berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas kepemilikan pribadi. Bahkan hasil wawancara menunjukkan bahwa 98% merupakan lahan pribadi milik masyarakat. Pernyataan tersebut ditunjang dengan hasil wawancara dengan perwakilan perusahaan yang menyatakan bahwa lahan yang berada di wilayah tersebut rata-rata merupakan kepemilikan sendiri.

"Di sini 98% kepemilikan lahan oleh masyarakat dan sisanya masyarakat tidak memiliki lahan atau penggarap lahan saja. ."⁴²

Selain kepemilikan lahan, asset sumber daya alam dilihat juga dari potensi lahan yang ada di RT 12. Luas wilayah RT 12 sebesar 400 hektar dengan potensi yang dapat dijadikan ladang pertanian sebesar 300 hektar. Jenis tanaman yang berpotensi ditanam di lahan tersebut antara lain adalah jenis hortikultural dan palawija, selain itu juga tanaman perkebunan seperti rambutan, matoa, pulasan, kopi. Saat ini sudah terdapat beberapa tumbuhan yang dibudidayakan oleh masyarakat antara lain tanaman nanas, sawit dan karet.

"Luas wilayah gambut di sini (RT 12) sebesar 400 hektar dan wilayah yang berpotensi dijadikan pertanian seluas 300 hektar. (Potensi jenis tanaman yang bisa dikembangkan?) jenis tanaman hortikultural dan palawija serta tanaman perkebunan seperti rambutan, matoa, pulasan, kopi. Saat ini beberapa masyarakat sudah melakukan kegiatan pertanian dengan beberapa jenis tanaman seperti nanas, sawit dan karet."⁴³

Jika melihat beberapa hasil wawancara di atas, asset sumber daya alam yang dimiliki oleh RT 12 Kelurahan Tanjung Palas berada dalam keadaan cukup baik. Beberapa alasan yang memperkuat pernyataan tersebut adalah *pertama*, Tingkat kepemilikan lahan yang cukup tinggi oleh masyarakat. *Kedua*, potensi luas lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. *Ketiga*, terdapat 300 hektar lahan yang berpotensi di manfaatkan dapat ditanami komoditas tanaman berniali ekonomis tinggi.

Akan tetapi terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait asset sumber daya alam. Berdasarkan analisis kerentanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa lahan yang tidak termanfaatkan akan menyebabkan kebakaran pada musim-musim kemarau. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun program pemberdayaan. Permasalahan yang di

⁴² Wawancara dengan R. Zamzam, 05/02/2020

⁴³ Wawancara dengan Sa'ad, 08/02/2020

hadapi masyarakat dapat diuraikan menggunakan pendekatan asset sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat.

Asset sumber daya finansial dapat dilihat dari mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat dan penghasilan rata-rata masyarakat. Mata pencaharian masyarakat rata-rata adalah wiraswasta dan petani dengan penghasilan rata-rata masyarakat sebesar 2 juta rupiah.

“mata pencaharian pokok masyarakat adalah wairaswasta dan petani, sedangkan penghasilan masyarakat rata-rata RP. 2.000.000 per bulan”⁴⁴

Jika melihat dari data upah minimum kabupaten, angka tersebut terbilang rendah. UMK Dumai merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau sebesar 3,3 juta rupiah. Maka dari itu data ini menunjukkan salah satu kerentanan yang terjadi di wilayah RT 12. Masyarakat memiliki penghasilan cukup rendah, di bawah upah minimum kabupaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat RT 12 termasuk dalam masyarakat dengan kategori kurang mampu.

Asset sumber daya fisik dapat dilihat dari beberapa indikator seperti keadaan fisik infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, hingga sanitasi. Asset sumber daya fisik dengan indikator *pertama* adalah infrastruktur pendidikan di wilayah RT 12 memang tidak ada, akan tetapi dalam lingkup kelurahan sudah terdapat 1 PAUD, 2 TK, 3 SD dan 1 SMP meskipun belum ada tingkat SMA akan tetapi masih dapat terjangkau oleh masyarakat⁴⁵. *Kedua*, adalah infrastruktur kesehatan. Memang belum terdapat fasilitas kesehatan khusus untuk wilayah RT 12. Akan tetapi pada tingkat kelurahan terdapat Pusat Kesehatan Kelurahan (Puskeskel), apotek, dan posyandu. Keseluruhan infrastruktur tersebut dirasa sudah cukup membantu dalam melayani kesehatan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa catatan dalam ketersediaan fasilitas penunjang kesehatan. *Ketiga*, adalah infrastruktur jalan. Keadaan jalan menjadi perhatian oleh masyarakat RT 12. Meskipun secara keseluruhan jalan Kelurahan Tanjung Palas sudah cukup baik, tetapi terdapat kerentanan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kondisi jalan di RT 12. Kondisi jalan saat ini berupa tanah dan akan sulit dilalui jika keadaan hujan, hal ini dirasakan oleh masyarakat RT 12 wilayah Paman Jaya khususnya. Bahkan beberapa waktu lalu masyarakat merasakan kerugian hingga 2ton hasil panen yang tidak bisa dijual disebabkan kendala jalanan yang tidak memungkinkan untuk dilewati. *Keempat*, adalah infrastruktur sanitasi. Masyarakat RT 12 wilayah Paman Jaya belum memiliki sanitasi yang baik.

⁴⁴ Wawancara dengan Sa'ad, 08/02/2020

⁴⁵ SODEC, p. 77.

*"keadaan sekolah di sini (RT 12) belum ada, keadaan kesehatan terekat dari sini ada Puskesmas, sedangkan jalan menjadi kendala kami. Akses jalan di sini rusak, apalagi ketika musim hujan. Menyebabkan jalan tanah tergenang dan juga lahan gambut yang rusak menyebabkan munculnya genangan air. Sehingga sulit bagi petani memobilisasi hasil pertanian ke pasar, selain itu pembeli juga tidak mau memasuki areal pertanian disebabkan kondisi jalan. Belum lama hasil panen kami bahkan tidak dapat terjual hingga 2 ton... kondisi sanitasi di sini (RT 12 wilayah Paman Jaya) juga belum ada sama sekali"*⁴⁶

Jika melihat sumber daya fisik yang ada di wilayah RT 12, maka sudah cukup baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Akan tetapi terdapat catatan pada bidang jalan dan sanitasi. Kedua bidang yang menjadi catatan apabila tidak ditangani dengan baik akan memiliki dampak yang berbeda. Untuk kondisi jalan yang tidak cukup baik akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Sedangkan untuk bidang sanitasi jika tidak ditangani dengan baik maka akan mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat yang buruk, meskipun fasilitas kesehatan sudah cukup memadai.

Aset sumber daya sosial memiliki beberapa indikator yang dijadikan tolak ukur penilaian. *Pertama* keberagaman suku di wilayah tersebut, dan *kedua* kelompok non formal yang berada di wilayah tersebut. Kelurahan Tanjung Palas secara keseluruhan memiliki empat suku yang berada di wilayah tersebut, antara lain adalah suku Jawa, suku Melayu, suku Batak, dan suku Minang. Suku Melayu cukup dominan dan di susul oleh suku Jawa yang memang sudah berada di wilayah Tanjung Palas sejak lama⁴⁷. Secara spesifik suku masyarakat yang berada dalam wilayah RT 12 adalah suku Melayu. Hal ini bisa dijadikan potensi karena kemungkinan munculnya konflik sangat kecil, dan semangat kesukuan juga menjadi cukup tinggi. Selain itu kelompok non formal di Kelurahan Tanjung Palas cukup banyak, seperti kelompok pertanian, kelompok nelayan maupun kelompok keagamaan. Sedangkan di RT 12 hanya terdapat kelompok tani yaitu Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri beranggotakan 30 orang yang bertempat tinggal di RT 12 wilayah Paman Jaya.

*"Terdapat kelompok non formal yakni Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri yang berfungsi sebagai wadah pertanian sebagian masyarakat RT 12 wilayah Paman Jaya."*⁴⁸

Jika melihat sumber daya sosial yang ada. Maka RT 12 memiliki Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri yang dapat dilibatkan dalam menjalankan rencana program pemberdayaan. Kelompok Paman Jaya Mandiri dapat dilibatkan dalam program

⁴⁶ Wawancara dengan R. Zamzam, 05/02/2020

⁴⁷ SODEC, p. 55.

⁴⁸ Wawancara dengan R. Zamzam, 05/02/2020

pemberdayaan masyarakat yang berupa program budidaya tanaman, pertanian ataupun perkebunan.

Rekomendasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lahan Gambut

Rekomendasi program perlu mempertimbangkan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian menganalisis potensi yang ada berdasarkan analisis penghidupan berkelanjutan dan dikemas menjadi sebuah program pemberdayaan berkelanjutan. Rekomendasi program berangkat dari kerentanan yang dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini kerentanan yang pertama adalah kebakaran lahan gambut. Hasil diskusi dengan masyarakat maka perusahaan perlu mengadakan pemanfaatan lahan gambut yang berpotensi untuk ditanami komoditas bernilai ekonomis dengan melibatkan asset sosial yang ada yaitu Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri.

Selanjutnya, kerentanan kedua adalah keadaan jalan yang tidak layak sehingga menyebabkan tidak terjualnya hasil panen masyarakat RT 12 wilayah Paman Jaya. Maka dari itu perusahaan perlu memprioritaskan pembangunan jalan utama masyarakat RT 12. Bantuan ini dapat menjamin penjualan hasil pertanian masyarakat saat ini juga dapat juga bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi perusahaan akan bekerjasama dengan Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri dalam memanfaatkan lahan gambut menjadi lahan pertanian produktif. Sehingga permasalahan gagal menjual hasil panen tidak terjadi lagi dikemudian hari. Kerentanan ketiga adalah rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat, salah satunya terlihat dari belum adanya sanitasi yang baik di masyarakat. Kerentanan ini perlu disikapi serius oleh perusahaan. Langkah yang cukup baik diambil adalah melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup sehat terlebih dahulu. Sehingga kesadaran masyarakat dalam membuat sanitasi yang baik muncul.

Pemilihan rekomendasi program merupakan hasil kesimpulan dari diskusi dengan masyarakat dan perwakilan perusahaan PT Pertamina (Persero) RU II Dumai. Pada sub bab bagian ini akan peneliti visualisasikan dengan sebuah tabel:

Tabel 1. Rekomendasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lahan Gambut

Kerentanan Masyarakat	Potensi Penghidupan berkelanjutan	Rekomendasi Program
- Terjadinya kebakaran lahan gambut. - Infrastruktur	Sumber Daya Manusia: - keadaan cukup baik, bahkan masyarakat sudah memiliki kemampuan yang cukup spesifik	- Pemanfaatan lahan gambut menjadi pertanian atau perkebunan yang dikelola oleh

jalan yang rusak dan menghambat mobilitas hasil panen dan sanitasi - Rendahnya kesadaran akan perilaku hidup sehat dan bersih	Sumber Daya Alam: - Keadaan cukup baik disebabkan Tingkat kepemilikan lahan yang cukup tinggi oleh masyarakat. - Potensi luas lahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. - 300 hektar lahan yang berpotensi di manfaatkan dapat ditanami komoditas tanaman berniali ekonomis tinggi	Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri - Perbaikan infrastuktur jalan pemukiman di RT 12 wilayah Paman Jaya - Perbaikan Sanitasi dan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Sumber Daya Finansial: - Keadaan penghasilan di bawah rata-rata menunjukan masyarakat termasuk dalam kategori kurang mampu	
	Sumber Daya Fisik: - Kondisi Fisik pendidikan dan kesehatan yang memadai - Kondisi fisik jalan yang buruk - Tdiak terdapat sanitasi yang baik	
	Sumber Daya Sosial: - Terdapat Kelompok Pertanian "Paman Jaya Mandiri"	

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi lapangan

C. Simpulan

Keadaan yang dialami oleh manusia saat ini merupakan akibat yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Seperti dalam surat Ar-Rum (30) ayat 41-42, yang menyatakan bahwa kerusakan yang muncul di dunia ini disebabkan oleh tangan manusia. Sama halnya musibah asap dialami oleh masyarakat, sebenarnya adalah akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Maka dari masyarakat perlu mengetahui kerentanan yang ada di masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian nantinya dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran lahan gambut.

Hasil penelitian yang dilakukan di RT 12 wilayah Paman Jaya Kelurahan Tanjung Palas menunjukan bahwa terdapat tiga kerentanan yang dirasakan oleh masyarakat. Antara lain adalah pertama terjadinya kebakaran lahan gambut, kedua Infrastruktur jalan yang rusak dan menghambat mobilitas hasil panen dan sanitasi, dan ketiga rendahnya kesadaran akan perilaku hidup sehat dan bersih. Dari hasil kerentanan yang ada, rekomendasi program pemberdayaan masyarakat yang perlu

dilakukan adalah pertama pemanfaatan lahan gambut menjadi pertanian atau perkebunan yang dikelola oleh Kelompok Tani Paman Jaya Mandiri, kedua perbaikan infrastruktur jalan pemukiman di RT 12 wilayah Paman Jaya, dan ketiga Perbaikan Sanitasi dan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Oekan S, Sunardi Sunardi, Ida Widianingsih, and Martha Fani Cahyandito, 'Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2019), 59 <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.24461>>
- Aditya, Rahadiyand, 'Analisis Penta Helix Dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratu Pada Tahun 2017', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>>
- Anonim, *Sustainable Livelihoods Guidance Sheet* (London: Department for International Development (DFID), 1999)
- BPS Kota Dumai, *Kecamatan Dumai Timur Dalam Angka 2019* (Kota Dumai, 2019)
- BPS Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka* (Riau, 2020)
- Cahyo, Andi N., and J Sapura, 'Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Tanaman Karet (*Hevea Brasiliensis*)', in *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014* (Palembang, 2014), pp. 341–48
- Dariah, Ai, and Maftuha, *Karakteristik Lahan Gambut*
- Dumai, BPS Kota, *Kota Dumai Dalam Angka* (Kota Dumai, 2020)
- Evans, Kate, 'Kelapa Sawit: Meningkatnya Ekspansi Petani Ke Kahan Gambut', <https://forestsnews.cifor.org/>, 2019 <<https://forestsnews.cifor.org/59857/kelapa-sawit-meningkatnya-ekspansi-petani-ke-lahan-gambut?fnl=id>> [accessed 11 March 2020]
- GAPKI, 'Sawit Tanaman Realistis Di Lahan Gambut', <https://gapki.id/>, 2017 <<https://gapki.id/news/1622/sawit-tanaman-realistic-di-lahan-gambut>> [accessed 11 March 2020]
- INCAS, 'Riau', <http://incas.menlhk.go.id/>, 2015 <<http://incas.menlhk.go.id/id/data/riau/>>
- J Moeloeng, Lexy, *Meotde Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2010)
- KLHK, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan*, 2019
- Kotalaha, Yosafat, and Gatot Sasongko, 'Kearifan Lokal "Makiriwo" Dalam Perspektif Sustainable Livelihood (Studi Kasus Petani Kelapa Desa Apulea, Kabupaten Halmahera Utara)', *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6.3 (2018), 256–62
- Lusiana, Susan, *Lahan Gambut Dan Drainability Limit* (Bogor, 2019)
- Masganti, Masganti, Khairil Anwar, and Maulia Aries Susanti, 'Potensi Dan

- Pemanfaatan Lahan Gambut Dangkal Untuk Pertanian', *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 11.1 (2017), 43–52 <<https://doi.org/10.2017/jsdl.v11n1.2017.%p>>
- Najiyati, Sri, Agus Asmana, and I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands Internasional, 2005)
- Noor, Muhammad, Masganti Masganti, and Fahmuddin Agus, *Pembentukan Dan Karakteristik Gambut Tropika Indonesia*, 2018
- Oktalina, Silvi Nur, San Afri Awang, and Slamet Hartono, 'Pemetaan Aset Penghidupan Petani Dalam Mengelola Hutan Rakyat Di Kabupaten Gunungkidul', *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23.1 (2016), 58–65
- Raharjo, ST, *CSR: Relasi Dinamis Antara Perusahaan Multinasional Dengan Masyarakat Lokal* (Semarang: Unpad Press, 2015)
- Sabiham, Supiandi, and Sukarman, 'Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia', *Pengelolaan Lahan Gambut Untuk Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia*, 6.2 (2012) <<https://doi.org/10.2018/jsdl.v6i2.6389>>
- Saragih, Sebastian, Jonatan Lassa, and Afan Ramli, *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan*, 2007
- Simatupang, Erwinton, and Vandy Yoga Swara, 'Creating Shared Value Di Industri Migas: Pelajaran Dari Balongan Dalam Meminimalisir Pengangguran Dan Menekan Potensi Kecelakaan Kerja', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2.1 (2019), 63–86 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-04>>
- SODEC, *Laporan Social Mapping Di Wilayah Pengembangan PT Pertamina RU II Dumai* (Yogyakarta, 2018)
- Sukarman, *Pembentukan Sebaran Dan Kesesuaian Lahan Gambut Indonesia*, 2015
- Suriadikarta, Didi Ardi, *Pembelajaran Dari Kegagalan Penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengolahan Lahan Gambut Berkelanjutan, Pengembangan Inovasi Pertanian* (Bogor, 2009), II
- Suwardi, and Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka, 2008)
- Tanjung, Banda Haruddin, 'Malaysia Dan Singapura Ancam Indonesia Terkait Kebakaran Hutan', *Https://News.Okezone.Com/*, 2016 <<https://news.okezone.com/read/2016/07/01/340/1430511/malaysia-dan-singapura-ancam-indonesia-terkait-kebakaran-hutan>>
- Wijayanti, Rathna, M. Baiquni, and Rika Harini, 'Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset Di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo', *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4.2 (2016), 133 <<https://doi.org/10.14710/jwl.4.2.133-152>>
- Zamroni, Sunaji, M. Zainal Anwar, Sugeng Yulianto, Abdur Rozaki, and Ashari Cahyo Edi, *Desa Mengembangkan Kehidupan Berkelanjutan* (Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2015)

Tindakan Sosial Kader TB Care Dalam Menanggulangi Penyakit TB Di Kota Malang

Siti Aminah

Universitas Islam Negeri Mataram

aminah.sosiolog@gmail.com

Abstrak: Dalam upaya mewujudkan malang zero TB pemerintah Kota Malang berkolaborasi dengan 'Aisyiyah untuk melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB. 'Aisyiyah melakukan tindakan melalui kader TB Care 'Aisyiyah. Kader TB Care kemudian melakukan tindakan sosial untuk menemukan dan membantu mengobati pasien TB. Melihat fenomena TB, Indonesia saat ini menempati peringkat ke 2 terbanyak di dunia. Jumlah penderita TB semakin lama semakin meningkat dan menyebabkan angka kematian yang cukup besar. Kondisi inilah yang menggerakkan 'Aisyiyah untuk memberikan kontribusinya dalam melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB Care dalam menanggulangi penyakit TB. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Webber menjadi acuan untuk membahas bagaimana tindakan sosial yang dilakukan dalam penelitian ini, guna mencari pemahaman kader TB Care dalam memaknai tindakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB Care 'Aisyiyah Kota Malang dilakukan atas kerjasama antara pemerintah melalui dinas kesehatan dengan 'Aisyiyah kota Malang. Tindakan penanggulangan TB dilakukan untuk mewujudkan masyarakat tanpa TB. Disamping itu juga tindakan sosial dilakukan sebagai gerakan *Amar Ma'ruf nahi munkar* dan mengubah pemahaman masyarakat yang masih keliru tentang penyakit TB. Sehingga terciptalah infrastruktur kesehatan yang baik dan lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat.

(Abstract: *In an effort to realize the zero TB Malang city government collaborate with 'Aisyiyah to take action to overcome TB disease. 'Aisyiyah took action through TB Care' Aisyiyah cadres. TB Care cadres then take social action to tackle and help treat TB patients. Seeing the phenomenon of TB, Indonesia is currently ranked the 2nd largest in the world. The number of TB patients is increasingly increasing and causes a considerable mortality rate. This condition that moves' Aisyiyah to give its contribution in doing the action of TB disease prevention in Malang. This study aims to determine the social action performed by TB Care cadres in tackling TB disease. Using a qualitative approach. Data collection is done by interview, observation and documentation collected and analyzed by descriptive qualitative. The social action theory proposed by Max Webber becomes a reference to discuss how the social action done in this research, to seek understanding of TB Care cadres in interpreting their actions. The results showed that the social action performed by TB Career 'Aisyiyah cadre of Malang City was done in cooperation between the government through*



Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(<http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/>) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as specified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

the health department with 'Aisyiyah Malang city. TB prevention measures are undertaken to create a community without TB. Besides, social action is done as a movement of Amar Ma'ruf nahi munkar and change the understanding of society that still wrong about TB disease. Thus creating a good health infrastructure and a comfortable living environment for the community)

Keywords: **TB Care Tindakan Sosial, TB,**

A. Pendahuluan

Dalam upaya mewujudkan Malang Zero TB, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan lembaga 'Aisyiyah untuk melakukan upaya penanggulangan penyakit TB di Kota Malang. Dalam melakukan tindakan tersebut 'Aisyiyah membentuk sebuah lembaga pemberdayaan yang disebut TB Care 'Aisyiyah. Anggota kader TB Care 'Aisyiyah berasal dari seluruh cabang 'Aisyiyah Kota Malang. Kader TB ini terhimpun dalam sebuah komunitas yang disebut komunitas kader TB Care 'Aisyiyah Kota Malang.

Lembaga 'Aisyiyah merasa perlu berperan dalam penanggulangan TB disebabkan karena beberapa hal, yakni: Sebagai wujud dari gerakan '*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*' dalam bidang kesehatan. Disamping itu juga karena TB adalah penyakit yang mengancam sumber daya manusia di Indonesia dan menyebabkan kematian. Dalam laporan WHO diperkirakan terdapat 8,6 juta kasus TB di tahun 2012 dimana 1,1 juta orang (13%) diantaranya adalah pasien dengan HIV positif. Sekitar 75% dari pasien tersebut berada di wilayah Afrika, pada tahun 2012 diperkirakan terdapat 450.000 orang yang menderita TB MDR dan 170.000 diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2012 diperkirakan proporsi kasus TB anak diantara seluruh kasus TB secara global mencapai 6% atau 530.000 pasien TB anak pertahun, atau sekitar 8% dari total kematian yang disebabkan oleh TB. Sedangkan Indonesia berpeluang mencapai penurunan angka kesakitan atau penurunan akibat TB menjadi setengahnya di tahun 2015 jika dibandingkan dengan data di tahun 1990. Angka prevalensi TB tahun 1990 sebesar 443 per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 ditargetkan menjadi 280 per 100.000 penduduk berdasarkan hasil survei prevalensi TB tahun 2013. Prevalensi TB paru smear positif per 100.000 penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar 257 (Info Data dan Informasi Kesehatan RI, Tahun: 2015)

Dalam menanggapi masalah ini 'Aisyiyah melakukan upaya pencegahan TB melalui tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB Care. Gabungan kader

TB Care 'Aisyiyah melakukan gerakan melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Tujuannya adalah Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan. Dalam melakukan tindakan penanggulangan, Kader TB membagi daerah kerja berdasarkan alamat masing-masing. Misalnya kader yang berasal dari Kecamatan Lowokwaru bertanggung jawab atas pasien yang ada di daerah tersebut. Demikian juga dengan kader yang berasal dari kecamatan yang lain. Sehingga dapat memudahkan kader dalam melakukan tindakan lapangan. Karena sudah mengetahui bagaimana kondisi daerah tersebut dengan baik.

TB Care 'Aisyiyah Kota Malang dikelola oleh SSR (*Sub-Sub Recipient*) yang terdiri kepala SSR yang bertugas sebagai pimpinan TB Care 'Aisyiyah Kota Malang. Kemudian Koordinator Program yang bertugas untuk mengkoordinir jalannya program kerja TB Care 'Aisyiyah Kota Malang, *Finance Officer* yang bertugas untuk mengurus keuangan dan *Data Colection* yang bertugas menghimpundan mengolah data pasien TB. Dengan demikian, langkah kerja kader TB Care lebih terorganisir dan terarah dalam melakukan tindakan lapangan. Dalam melakukan tindakan, kader TB Care 'Aisyiyah berpegang pada sebuah semboyan yang dijadikan sebagai metode kerja di lapangan yakni *TOSS* (Temukan TB, Obati Sampai Sembuh). Dengan demikian, kader TB Care melakukan tindakan sosial dalam menanggulangi penyakit TB di Kota Malang di bawah naungan lembaga 'Aisyiyah dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Tindakan sosial dilakukan atas petunjuk dan program kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni 'Aisyiyah dan Dinas Kesehatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan kegiatan observasi atau pengamatan terhadap gejala atau fakta yang ada di lapangan dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2010:5-13). Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian yang *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), subjek yang alamiah yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada subjek tersebut (Sugiyono, 2013:8). Penelitian kualitatif menjelaskan bahwa prinsip dasar yang dikembangkan dalam paradigma definisi, disusun berdasarkan asumsi bahwa setiap individu bisa melihat dirinya sebagaimana dia melihat orang lain, individu juga tidak pasif, artinya memiliki kemampuan

membaca situasi yang melingkupi hidupnya. Pola interaksi yang dikembangkan oleh individu dalam aktivitas sosialnya dapat ditentukan oleh bagaimana individu tersebut menafsirkan situasi yang melingkupi hidupnya. (Soetrisno & Hanafie, 2004: 3).

Adapun teknik pengumpulan data utama adalah dengan melakukan observasi langsung atau *participant observation*, wawancara mendalam, penelusuran dokumen (data tertulis), gambar dan sebagainya. Observasi Partisipan Yakni observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Peneliti memainkan dua peran, yaitu *pertama* sebagai anggota peserta dalam kehidupan masyarakat, dan *kedua* sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang perilaku masyarakat dan perilaku individunya. (Emzir, 2010:39). Adapun wawancara mendalam secara umum tidak dilakukan dengan terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell. 2009:232). Adapun teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses *data reduction*, *data display* dan *varivication*. (Miles dan Huberman, 1992:294)

1. *Data reduction*, adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak sehingga perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan kepada hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi akan memunculkan gambaran yang jelas.
2. *Data display*, dalam penelitian kualitatif data display bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadidan mudah untuk merencanakan tahapan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. *Verification*, adalah kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sehingga memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

B. Tinjauan Pustaka

Perspektif Teori Tindakan Sosial.

Dalam teori tindakan sosial Ada tiga unsur tindakan sosial: agen (*agents*), pergerakan (*vehicles*) dan makna (*meaning*). Agen adalah aktor dan objek dari tindakan sosial yang berperilaku, sedangkan lainnya merupakan objek dari perilaku tersebut. Pergerakan adalah kondisi fisik, aspek, gerakan, atau kegiatan dari agen yang memiliki makna bagi mereka. Sedangkan makna merupakan elemen dari tindakan sosial (M. Jacky: 2015: 11). Oleh karena itu peneliti menggunakan teori tindakan sosial sebagai acuan untuk melihat bagaimana tipe dan makna tindakan sosial kader TB Care Aisyiyah dalam menanggulangi penyakit TB di Kota Malang.

Dalam teori tindakan sosial Max Weber mengatakan bahwa individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial (I.B Wirawan: 2013:79). Teori ini kemudian mendapat kritik dari paradigma fakta sosial yang menyatakan bahwa individu (aktor) tidak ada yang sepenuhnya bebas dalam melakukan tindakan. Melainkan terikat oleh suatu sistem norma atau nilai. Secara terperinci fakta sosial itu terdiri atas: kelompok, kesatuan masyarakat tertentu (*Societies*), sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah dan sebagainya (George Ritzert: 2013:19).

Max Weber mengklasifikasi ada empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Keempat jenis tindakan sosial itu adalah:

1. Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*).

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu kemudian memilih alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektifitasnya. Sesudah tindakan itu dilaksanakan, orang itu dapat menentukan secara obyektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. (Doyle Paul Johnson: 1994:220).

2. Rasionalitas Yang Berorientasi Nilai (*Wertrationalitat*).

Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar; tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya (Doyle Paul Johnson: 1994:221).

3. Tindakan Tradisional.

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat non rasional. Misalnya seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Maka perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta. Dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaan baginya. (Doyle Paul Johnson: 1994:221).

4. Tindakan Afektif.

Tipe tindakan ini berbeda dengan tindakan instrumental yang didasari atas pertimbangan yang sadar sedangkan tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. (Doyle Paul Johnson: 1994:221). Tindakan afektif

sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. (Dwi Narwoko & Bagong Suyatno, 2006: 18-19)

Oleh karena itu untuk menemukan suatu perbedaan antara tipe-tipe tindakan yang berbeda atas dasar ini penting. Untuk memahami Pola perilaku khusus yang sama mungkin bisa sesuai dengan kategori-kategori tindakan sosial yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Dengan demikian teori tindakan sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana tipe tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB Care 'Aisyiyah Kota Malang. Tindakan sosial kader TB Care kemudian melahirkan makna-makna subyektif dari masing-masing aktor. Hal ini dapat diketahui melalui penelitian dan analisis yang mendalam.

1. Gerakan Global Penanggulangan TB

Dalam mengamati gerakan global penanggulang penyakit TB. WHO telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam pengendalian TB sejak tahun 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomis sangat efektif (*cost-effective*). Integrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar sangat dianjurkan demi efisiensi dan efektifitasnya. (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 4)

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan rantai penularan TB dan dengan demikian menurunkan insidens TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Dengan semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi program di banyak negara. (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 4).

3. Gerakan 'Aisyiyah dalam menanggulangi penyakit TB

Program penanggulangan TB oleh 'Aisyiyah merupakan wujud peran serta 'Aisyiyah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia serta upaya untuk pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) No.6 yaitu penurunan angka

penyebaran penyakit menular khususnya penyakit TB. Program TB care yang telah dilaksanakan oleh PDA 'Aisyiyah antara lain berupa kegiatan pelatihan TB bagi kader masyarakat. Kegiatan pelatihan bagi kader bertujuan menghasilkan kader TB yang akan bertugas sebagai petugas penyuluhan bagi pasien TB, keluarga pasien dan masyarakat umum. Kader TB mempunyai tugas lain yaitu melakukan pendampingan bagi pasien TB yang sedang menjalani pengobatan, mengantar pasien TB memeriksakan dahak dan berobat ke Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) serta memastikan bahwa pasien yang didampingi pengobatannya dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. (Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah, 2015:54-55).

C. Hasil dan pembahasan

Tipe Tindakan Sosial Kader TB Care Dalam Menanggulangi Penyakit TB Di Kota Malang

a. Tipe Rasionalitas Instrumental (Tindakan Rasional)

Dalam melakukan gerakan penanggulangan penyakit TB, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh kader TB Care atas pertimbangan sadar . Serta adanya instrumen untuk mencapai tujuan dari tindakan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen adalah lembaga 'Aisyiyah dan dinas kesehatan yang ditopang dengan dana dari *Global Fund*. Beberapa instrumen tersebut menjadi alat bantu yang memberikan kontribusi besar terhadap tingkat keberhasilan kader TB Care. 'Aisyiyah menjadi wadah penggerak TB dan dibantu oleh dinas kesehatan. Serta *Global fund* sebagai instrumen yang membantu dalam hal finansial. Sehingga program penanggulangan penyakit TB berjalan lancar. Sedangkan kader TB Care 'Aisyiyah merupakan aktor yang melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB di Kota Malang.

Adapun beberapa tindakan sosial yang tergolong dalam tindakan rasionalitas instrumental ini adalah. Mulai dari tahap penyuluhan. Tahapan penyuluhan dilakukan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh kader dalam beberapa pelatihan sebelumnya. Demikian juga dengan cara menemukan suspek,

membawa terduga ke Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengawasan Menelan Obat, maupun proses pencatatan dan pelaporan perkembangan pasien TB. Semua tindakan yang dilakukan oleh kader dilakukan dengan pertimbangan sadar untuk memperoleh keberhasilan pada masing-masing tindakan yang dilakukan. Dengan demikian maka tindakan sosial kader TB dalam menanggulangi penyakit TB dilakukan secara efektif. Sehingga berhasil memperoleh dan menyembuhkan pasien TB di Kota Malang.

Dalam upaya melakukan gerakan masih ada kader TB Care yang kurang aktif bahkan tidak aktif dalam tindakan-tindakan tertentu. Seperti jarang mengikuti acara penyuluhan dan tidak aktif dalam menemukan suspect TB. Bahkan dalam laporan tahunan presentasi penemuan kasus TB masih ada yang kosong. Melainkan hanya hadir pada acara tertentu yang pelaksanaannya lebih mewah dengan hadiah yang cukup besar. Sehingga tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB semacam ini masuk dalam kategori tindakan sosial yang berorientasi pada nilai (Finansial).

b. Tipe Rasionalitas Berorientasi Nilai (Tindakan Yang Berorientasi Nilai)

Dalam penelitian ini muncul beberapa jenis tindakan yang berorientasi pada nilai nilai. Diantaranya adalah (1) tindakan sosial yang dilakukan untuk memperoleh *Reward* berupa pahala. Dimana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dasar gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh 'Aisyiyah berdasar pada Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Tindakan sosial kader TB dilakukan sebagai bentuk amal sholih. Tindakan yang dilakukan hanya mengharap ridho Allah dan mendapatkan pahala. Dalam konteks ini maka pahala merupakan *value* atau nilai.

(2) tindakan sosial kader TB Care juga dilakukan untuk mengubah *Mindset* Masyarakat. Dalam memahami dan menanggapi penyakit TB, masih ada dari kalangan masyarakat yang memberikan stigma terhadap pasien. Dengan menganggap

bahwa penyakit TB adalah penyakit keturunan, penyakit TB adalah penyakit orang miskin, dan penyakit TB adalah penyakit kutukan. Sehingga dengan adanya gerakan atau tindakan kader dalam mensosialisasikan tentang penyakit TB dapat mengubah *Mindset* masyarakat yang keliru dalam memahami penyakit TB. Sehingga budaya menstigma pasien dapat berubah menjadi pemahaman yang tepat dalam mengartikan penyakit TB. Hal ini memberikan pengaruh positif bagi suksesnya upaya penanggulangan penyakit TB di Kota Malang.

c. Tipe Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini merupakan tipe tindakan yang lahir dari respon individu terhadap kondisi lingkungan dan sosial yang secara spontan keluar. Dalam penelitian ini kader TB yang melakukan tindakan sebagai respon terhadap rasa empati yang ada dalam diri individu karena melihat kondisi penyakit TB. Oleh karena itu rasa empati yang ada dalam individu dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan sosial. Maka tindakan ini tergolong dalam tindakan Afektif.

d. Tipe Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan jenis tindakan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan tradisional dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang merupakan pengulangan dari tindakan sebelumnya. Tindakan ini berasal dari *sentiment* yang berpengaruh dalam (*affectual sentiments*) atau sebagai sebuah tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam penelitian tentang tindakan sosial kader TB Care dalam menanggulangi penyakit TB di Kota Malang ternyata tidak ditemukan tipe tindakan tradisional.

Tipe tindakan tradisional cenderung dilakukan karena merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Tipe tindakan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang sadar melainkan hanya mengikuti tradisi sebelumnya. Sehingga aktor yang melakukan tindakan ini tidak mengetahui alasan rasional mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Sedangkan dalam

tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB Care di Kota Malang, semuanya dilakukan berdasarkan prosedur kerja yang diberikan oleh 'Aisyiyah dan Dinas Kesehatan melalui beberapa pertemuan dalam pelatihan maupun monitoring dan evaluasi. Sehingga tindakan sosial yang dilakukan memang beralasan dan berdasarkan standart operasional kerja.

Pemaknaan Kader TB Care Terhadap Tindakan Sosial Kader TB Dalam Menanggulangi Penyakit TB Di Kota Malang

Setelah adanya aktor yakni kader TB Care 'Aisyiyah Kota Malang yang menghadirkan pergerakan dalam wujud beberapa tindakan sosial seperti yang dijelaskan di atas. Maka selanjutnya muncullah makna dari tindakan sosial kader TB Care berikut ini:

a. Tindakan Sosial Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Tindakan sosial yang dilakukan oleh kader TB Care 'Aisyiyah Kota Malang tidak lepas dari komitmen yang dimiliki 'Aisyiyah melalui Majelis Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai gerakan yang memelopori kesehatan, majlis kesehatan yang ada di 'Aisyiyah hadir sebagai wujud gerakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Yakni menegakkan pola hidup yang sehat bagi masyarakat umum dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Inilah dasar gerakan kader TB dalam melakukan tindakan sosial dalam penanggulangan penyakit TB. Oleh karena itu tindakan sosial kader TB Care dimaknai sebagai wujud gerakan Majelis Kesehatan 'Aisyiyah Kota Malang.

b. Tindakan Sosial Sebagai Gerakan Keagamaan 'Aisyiyah

Dalam melakukan beberapa tindakan penanggulangan penyakit TB, 'Aisyiyah berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Sehingga dalam melakukan tindakan kader tidak keluar dari perintah Allah dan larangannya yang kemudian dalam majlis kesehatan disebut sebagai penggerak terwujudnya *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Tindakan kader TB dilakukan sebagai bentuk amal sholih. Dalam melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB anggota kader berpegang pada firman Allah dalam surah (*An-Nahl : 16:97*) yang artinya : *"barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki*

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Oleh karena itu tindakan sosial kader TB dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien diharapkan bernilai ibadah. Beribadah menurut kader bukan hanya dilakukan di masjid, berpuasa dan mengaji atupun berzikir. Akan tetapi tindakan sosial yang berguna bagi masyarakat juga merupakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kader TB menilai tindakan sosial yang dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.

Melalui tindakan ini para Kader telah membuktikan bahwa dirinya telah berkontribusi untuk membantu kesembuhan penderita TB. Kader telah menjalankan tugas dengan meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, mengawasi dan memantau pengobatan penderita TB sampai dinyatakan sembuh oleh tenaga kesehatan. Para kader juga telah menerapkan prinsip kesalehan sosial yaitu peduli, perhatian dan berperan dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakat dalam hal ini di bidang kesehatan. Kader TB yang berasal dari masyarakat telah membuktikan diri, bahwa dirinya mempunyai kontribusi dalam kehidupan sosial kemsayarakatan dengan ikut menanggulangi penyakit TB sehingga penderita dapat sembuh dari penyakitnya serta dapat mencegah penularan TB yang lebih luas kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya.

c. Tindakan Sosial Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat Marginal

Secara ilmiah penyakit (*disease*) itu diartikan sebagai gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan dari lingkungan. Jadi penyakit itu bersifat objektif. Sebaliknya, sakit (*illness*) adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Fenomena subjektif ini ditandai dengan perasaan tidak enak. (Solita Sarwono: 1993: 31). Sedangkan kader TB Care 'Aisyiyah memandang penyakit TB ini

banyak disdrita dari golongan masyarakat bawah (miskin) karena standart kesehatan yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka, diantaranya adalah sandang, pangan dan papan yang tidak layak. Kader memaknai bahwa penderita penyakit TB banyak didominasi oleh golongan miskin. Masyarakat miskin lebih rentan terkena penyakit TB karena tingkat kecukupan gizi yang sangat rendah, kualitas tempat tinggal yang kumuh dan kurang higienis dibandingkan dengan keluarga yang kaya. Hal ini disebabkan untuk kebutuhan hidup yang sehat pasti mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi seseorang. Rendahnya kemampuan masyarakat miskin dalam menciptakan pola hidup yang sehat menyebabkan masyarakat miskin lebih cepat terserang penyakit TB dibandingkan dengan masyarakat yang dengan standart ekonomi tinggi.

Dengan demikian bahwa pasien TB dipandang oleh kader biasanya muncul dari kalangan masyarakat lemah. Artinya lemah secara ekonomi, tidak mempunyai kepedulian terhadap kondisi kesehatan, tidak memperdulikan tempat tinggal. Disamping itu sebagian masyarakat yang terkena TB sangat awam dengan penyakit yang mereka derita. Sehingga tidak mempunyai kekhawatiran terhadap kondisi yang dialaminya. Hal inilah yang menjadi langkah awal kader harus melakukan tindakan sosial dalam penanggulangan penyakit TB. Terlebih jika pasien TB mempunyai pemahaman yang sangat rendah sehingga sangat membutuhkan informasi tentang penyakit TB dan bahaya penyakit TB. Oleh karena itu kader TB juga memaknai tindakannya untuk membantu masyarakat yang termarginalkan.

d. Tindakan Sosial Sebagai Upaya Mencegah Penularan Penyakit TB

Penyakit TB merupakan penyakit yang penularannya sangat cepat. dimana masyarakat dapat dengan mudah terinfeksi kuman *mycobacterium tubercolosa*. TB merupakan penyakit yang sangat cepat menular melalui udara pada waktu penderita batuk atau bersin. Keadaan lingkungan, ventilasi udara di ruangan, lama pajanan, jumlah percik renik, ukuran dan konsentrasi kuman mempengaruhi

proses infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Kondisi penderita TB yang dapat menimbulkan risiko penularan antara lain terdapatnya TB paru, batuk produktif, sputum basil tahan asam (BTA) positif, tampak kavitas pada foto toraks, saat batuk atau bersin tidak menutup hidung atau mulut, terapi anti TB yang tidak tepat dan teratur, serta menjalani prosedur yang menginduksi batuk seperti induksi batuk, bronkoskopi dan suction. Tuberkulosis dimulai dari infeksi primer yang sering tidak menimbulkan gejala dan kemudian dapat sembuh sendiri sehingga uji tuberkulin berubah dari negatif menjadi positif. (Amir Luthfi, Sardikin Giri Putro, 2012: 30).

Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat tanpa sengaja menghirup udara yang tercemar oleh bakteri tersebut. Terutama pada masyarakat yang mempunyai tingkat daya tahan tubuh lemah. Dari proses penularan penyakit TB yang sangat cepat atau dapat terjadi pada siapapun, maka diperlukan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ini. Terutama bagi keluarga yang salah satu anggotanya terjangkit penyakit TB. Diperlukan kepedulian bagi anggota keluarga yang lain dan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menjaga lingkungan. Supaya tidak terkontaminasi dari bakteri penyakit TB. Sehingga dapat mengurangi angka penderita penyakit TB.

Oleh karena itu, maka kader kemudian melakukan berbagai macam tindakan untuk menghambat penyebaran penyakit TB. Sehingga dengan adanya program ini bukan hanya pasien yang terselamatkan tetapi masyarakat umum juga menjadi lebih nyaman. Oleh karena itu salah satu pemaknaan kader TB dalam melakukan tindakan sosial ini adalah untuk membantu masyarakat umum. Mengingat bahwa penderita dari penyakit TB ini selalu berada di tengah masyarakat. Semakin besar usaha masyarakat dalam menanggulangi penyakit TB maka penderita akan semakin berkurang. Oleh karena itu masyarakat harus memandang penyakit TB sebagai penyakit yang harus dilawan bersama. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan pola hidup yang sehat dan bersih mulai dari sandang, pangan maupun papan.

Untuk menyelamatkan masyarakat secara umum maka masalah TB harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan semua orang yang melakukan kontak dalam waktu lama, dalam frekuensi yang sering atau selalu berdekatan dengan penderita TB beresiko tinggi ikut terinfeksi penyakit TB. Penularan penyakit TB yang sangat cepat terkadang tidak disadari pada masyarakat sekitar. Dimana ketika dalam masyarakat sekitar terdapat penderita TB yang batuk-batuk, bersin-bersin ataupun batuk berdahak dan membuang dahak sembarangan, inilah kemudian yang menjadi media penularan penyakit TB yang sangat cepat karena masuk ke tubuh melalui pernapasan. Terutama terhadap masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah atau kekurangan gizi. Hal ini juga memicu cepatnya penularan dan penyebaran penyakit TB terhadap masyarakat umum.

D. Kesimpulan

Tipe Tindakan Sosial Kader TB Care Dalam Menanggulangi Penyakit TB di Kota Malang

Dalam menanggulangi penyakit TB di Kota Malang diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah melalui dinas kesehatan dengan 'Aisyiyah. Sehingga dapat menopang keberhasilan kerja yang dilakukan oleh kader TB Care. Melalui beberapa tipe tindakan berikut ini:

- a. Tindakan instrumental kader TB dilakukan atas pertimbangan rasional. Dengan menjadikan dinas sosial dan 'Aisyiyah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Serta dukungan finansial dari *Global Fund* sebagai instrumen pendukung dalam kesuksesan kader TB dalam melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB di Kota Malang.
- b. Tindakan berorientasi nilai. Kader TB Care juga menjadikan nilai sebagai motivasi kerja dalam melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB di Kota Malang. Beberapa nilai yang dimaksud adalah nilai agama, nilai ekonomi dan budaya.
- c. Tindakan tradisional. Sedangkan dalam tindakan tradisional kader TB Care menjadikan program sebelumnya sebagai patokan.

Mengikuti apa yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh keberhasilan sehingga tindakan sosial dalam menanggulangi penyakit TB dilakukan secara berulang-ulang mengikuti program dan kader sebelumnya.

- d. Tindakan Afektif. Dalam tindakan ini rasa empati dan pengalaman pribadi kader menjadi pendorong yang kuat bagi kader TB Care dalam melakukan tindakan penanggulangan penyakit TB di Kota Malang.

Pemaknaan Kader TB terhadap Tindakan Penanggulangan Penyakit TB

- a. Kader memaknai tindakan sosial dalam menanggulangi penyakit TB sebagai ibadah kepada Allah. Tindakan sosial dilakukan sebagai bentuk amal sholih yang dilakukan hamba terhadap tuhan-NYA.
- b. Kader memaknai tindakan penanggulangan penyakit TB sebagai upaya untuk membantu masyarakat umum dari penularan penyakit TB. Terutama karena penyakit TB merupakan penyakit yang penularannya sangat cepat. Sehingga mengancam semua orang.
- c. Kader memaknai tindakan penanggulangan penyakit TB sebagai upaya untuk mengangkat derajat masyarakat marginal.
- d. Tindakan sosial kader TB Care dilakukan sebagai upaya 'Aisyiyah dalam mewujudkan infrastruktur kesehatan yang baik serta lingkungan hidup yang nyaman.

E. SARAN

1. Bagi Pemerintah sebaiknya lebih banyak melakukan kolaborasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga swasta dalam menjalankan program kerja di berbagai bidang. Sehingga dapat mempermudah dan memperlancar jalannya program kerja yang direncanakan.
2. Bagi lembaga swasta sebaiknya lebih sering menerima kerjasama dari pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga yang memberikan manfaat terhadap masyarakat.

3. Bagi masyarakat sebaiknya memberikan dukungan terhadap program kerja yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta yang sekiranya mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Daftar Rujukan

- Creswell, John W, 1998. *Qualitative Inquiry: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications
- Denzim, Norman K., and Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of qualitative research* (terjemahan). Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press
- I.B Wirawan. 2013. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup.
- Jochnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Kementerian Kesehatan RI Tahun 2014: Pedoman Nasional Pengendalian Tuberculosis.
- Miles, M.B, & Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis*, (2nd ed). Beverly Hills California: Sage Publication, Inc
- M. Jacky. 2015. *Sosiologi, Konsep, teori, dan Metode* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*, bandung: PT Remaja Rosdakarya edisi revisi
- Narwoko, J Dwi & Suyatno, Bagong. 2006, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Prenada Media Group)
- Paloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, tahun 2015. Tentang *Tuberculosis* Temukan Obati Sampai Sembuh.

Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sarwono, Solita. 1993. *Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet.

Jurnal

Hendra Gunawan, Yayat Hidayat. (2015). Motivasi Kader Komunitas Dalam Program Penanggulangan Tuberkulosis 'Aisyiyah Kabupaten Bandung. Diakses pada 08 november 2017, pada file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/Documents/HendraGunawanDkk_JKA_Vol2_No1_Juni_2015_07.pdf.

MODEL KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI-PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DALAM BINGKAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ahmad Kharis, Saipullah Hasan
IAIN Salatiga

kharisa4@gmail.com, saipulhasan@iainsalatiga.ac.id

Abstrak: Dalam konsep pluralisme kesejahteraan (*welfare pluralism*), usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Di luar pemerintahan (negara), ada sektor lain yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat yaitu sektor kerelawanan (*voluntary*), informal, dan komersial. Pandangan ini sedemikian kuat telah mendukung konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility—CSR*). Namun, dalam praktiknya upaya mewujudkan CSR tidak berlangsung dengan mudah. Berbagai masalah dapat menjadi kendalanya, misalnya adalah perbedaan pemahaman baik di kalangan internal perusahaan maupun eksternal, adanya ego sektoral dan keterbatasan SDM perusahaan. Dengan demikian, diperlukan kehadiran mediator untuk menyatukan pemahaman serta menyelaraskan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan CSR. Dalam hal ini, perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi (PT), sebagai agen pemikiran dan perubahan sosial dapat memegang peranan penting untuk menjalankan fungsi mediasi tersebut melalui suatu model kemitraan. Tulisan ini menganalisis bagaimana model kemitraan antara PT, perusahaan dan pemerintah dalam bingkai CSR yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa model kemitraan secara kolaborasi memainkan peran penting dalam menyatukan pemahaman dan menyelaraskan kepentingan bersama guna mewujudkan keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

[Abstract: *In the concept of welfare pluralism, efforts to realize social welfare are seen as a shared responsibility, not just the government. Outside the government (state), there are other sectors that are responsible for the welfare of society, namely the voluntary, informal and commercial sectors. This view has strongly supported the concept of corporate social responsibility. However, in practice the effort to realize CSR does not take place easily. Various problems can become obstacles, for example differences in understanding both within the internal and external circles, the existence of sectoral egos and the limitations of the company's human resources. Thus, the presence of mediators is needed to unify understanding and align common interests in order to realize CSR. In this case, universities, including tertiary institutions, as agents of thought and social change can play an important role in carrying out the mediation function through a partnership model. This paper analyzes how the partnership between companies, companies and the government in the CSR frame which leads to community welfare. The results of the analysis show that the collaborative partnership model plays an important role in uniting understanding and*



Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/>) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as specified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

aligning common interests in order to realize business sustainability and public welfare.]

Kata kunci: *Model Kemitraan, PT, Perusahaan dan Pemerintah, CSR.*

A. Pendahuluan

Usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejak paruh akhir abad ke-20 dipandang bukan lagi sekadar tanggung jawab sektor pemerintahan (negara) saja. Tanggung jawab kesejahteraan sosial melibatkan banyak sektor. Neil Gilbert (dalam Midgley, 2009: 236) menyebutkan empat sektor yang terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu sektor pemerintahan, kerelawanan (*voluntary*), informal, dan komersial. Sementara itu, Spicker menyebutkan lima sektor yang terdiri dari *sektor publik*, *sektor swasta (private)*, *kerelawanan (voluntary)*, *kerja sama (mutual aid)*, dan *sektor informal* (Krisdyatmiko, 2012: 127). Pandangan tentang kesejahteraan masyarakat seperti itu disebut sebagai pluralisme kesejahteraan (*welfare pluralism*).

Pluralisme kesejahteraan ini sedemikian kuat telah mendukung kehadiran konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility—CSR*). Kini di Indonesia, apalagi setelah Reformasi yang membukakan peluang bagi masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan, CSR telah menjadi isu penting berkaitan dengan masalah dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (Poerwanto, 2010: 16).

Dalam level global isu CSR sebenarnya telah mulai muncul pada dekade 1950-an. Tepatnya isu tanggung jawab sosial dalam dunia usaha ini pertama kali digunakan oleh Howard R. Bowen di dalam bukunya yang berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* (1953). Menurut Bowen (1953: 6) tanggung jawab sosial pelaku bisnis dalam membuat keputusan, menjalankan kebijakan dan melakukan tindakan diharapkan dapat menyesuaikan dengan tujuan dan nilai sosial yang dianut masyarakat. Dengan menjalankan bisnis sesuai tujuan dan nilai sosial, suatu perusahaan akan mudah menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya sehingga mudah pula diterima oleh masyarakat.

Di Indonesia kewajiban perusahaan melaksanakan CSR telah diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2007, yaitu undang-undang tentang perseroan terbatas. Dalam undang-undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mewujudkan pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan. Pada Bab V pasal 74 ayat 1-4 dijelaskan mengenai definisi dan sanksi apabila

perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut Scots (dalam Muthuri dan Gilbert, 2010: 4) tekanan regulasi akan menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk penerapan CSR baik dalam hal fokus sasaran maupun bentuknya. Hal senada juga disampaikan Robert Reich bahwa hukum adalah satu-satunya alat yang memungkinkan untuk mendorong perusahaan agar menjalankan tanggung jawab sosialnya (Shaw, 2009: 570).

Adanya dorongan, tuntutan, kewajiban dan kebutuhan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sering kali tidak dapat berlangsung dengan mudah. Persoalan yang biasanya muncul ialah belum adanya kesamaan pemahaman, visi dan misi dalam menentukan keberpihakan di antara para pemangku kepentingan, khususnya perusahaan dan pemerintah. Selain itu, masih juga ada suatu ketidaktahuan dengan siapa seharusnya perusahaan merumuskan dan melaksanakan CSR. Apakah kewenangan mengelola CSR ada di pihak perusahaan ataukah pemerintah yang memiliki otoritas menjalankan amanah undang-undang untuk mengatur daerah dan masyarakatnya? Menurut Susetiwawan (2012: 05) setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat masih memiliki pemaknaan sendiri-sendiri tentang CSR.

Munculnya kasus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cirebon tentang tanggung jawab sosial merupakan salah satu contoh yang relevan dalam hal ini. Terkait Raperda tersebut, terutama pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan program yang menjadi prioritas perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK UGM) menyatakan bahwa peraturan tersebut rentan dimanipulasi oleh elit politik sehingga peraturan tersebut lebih berpihak pada kepentingan mereka dari pada kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan pembangunan masyarakat (Susetiwawan, 2012).

Perbedaan pemahaman tentang CSR juga ditemukan dari sudut pandang pemangku kepentingan. Secara lebih spesifik, perbedaan tersebut tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam upaya pemecahan masalah sosial, apakah kewajiban pemerintah atau perusahaan? Munculnya perbedaan penafsiran tanggung jawab sosial tentang kesejahteraan dan pemecahan masalah sosial antara perusahaan dan pemerintah ini dijelaskan oleh Friedman (Henningfeld dkk, 2006: 12). Ia menyatakan bahwa munculnya isu atau masalah sosial adalah sepenuhnya tanggung jawab negara. Alasannya ialah bahwa perusahaan

merupakan organisasi bisnis yang tidak terlatih untuk menetapkan dan mencapai tujuan sosial. Jadi, perusahaan cukup bertanggung jawab kepada pemerintah dengan membayar pajak, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karenanya, sebuah kesalahan apabila perusahaan masih dibebani dengan urusan pemecahan masalah sosial karena hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Penolakan perusahaan untuk ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pemecahan masalah sosial dikarenakan oleh keterbatasan SDM perusahaan dan kepentingan ego sektoral mereka. Untuk merespons berbagai *problem* tersebut, sudah diperlukan kehadiran mediator guna menyatukan pemahaman dan visi bersama tentang perumusan dan praktik CSR.

Peran mediator dalam hal ini dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai lembaga pemikiran dan agen perubahan sosial, termasuk PT yang memiliki karakteristik keagamaan Islam. Karakteristik itu tidak menghalangi PT untuk bersinergi dengan komponen lain untuk mencari model kemitraan antara perusahaan dan pemerintah guna mewujudkan CSR. Sebaliknya, karakteristik itu justru dapat dijadikan sebagai nilai tambah PT dalam usaha mewujudkan CSR. Faktor keislaman dalam hal ini justru dapat meneguhkan CSR dengan memberikan landasan religius terhadap keberadaan CSR ini.

Tidak diragukan lagi bahwa pada dasarnya ajaran dan nilai-nilai keislaman memberikan tekanan yang kuat pada pentingnya manusia mempunyai tanggung jawab dan kepedulian sosial. PT memiliki wilayah kajian keislaman yang strategis untuk mewujudkan tanggung jawab sosial yang akan menguatkan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka meraih kesejahteraan. Penelitian ini akan memberikan gambaran utuh tentang model kemitraan antara PT, pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat.

B. Pembahasan

Semangat PT Dalam Praktik Tanggung Jawab Sosial

Dilingkup PT sejauh ini telah terjadi pergeseran penting perihal orientasi pendidikan. Pandangan Islam bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan kelimuan dan membagi nilai pengetahuan saja kini sudah dianggap ketinggalan zaman walaupun bukan ditolak. Sebagai gantinya, kini muncul orientasi baru pendidikan, yakni bahwa tujuan pendidikan tidaklah semata-mata untuk memberikan ilmu pengetahuan agama dan menyebarkanluaskannya untuk kepentingan umat, tetapi untuk kebaikan dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat. Dalam perspektif baru seperti itu, upaya mewujudkan tanggung jawab sosial dipandang sebagai sebuah keharusan dan pada hakikatnya menjadi kebutuhan.

Semangat untuk praktik pendidikan dengan orientasi perubahan sosial ini didasari oleh gagasan Antonio Gramsci tentang intelektual organik (*organics intellectual*). Menurut Gramsci intelektual organik adalah para intelektual yang memiliki keseimbangan antara teori dan praktik. Tugas intelektual organik tidak sekedar memberikan makna atas realitas sosial, melainkan juga bergerak langsung dalam ranah praksis untuk ikut menciptakan sejarah dengan membangun gerakan pemikiran dan kesadaran kritis guna memberi makna masa depan kita sendiri (Fakih, 2011: xxi).

Gagasan ini relevan dengan amanah Undang-undang No 12 Tahun 2012 bahwa proses pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tidak hanya mengemban kepercayaan untuk mengembangkan kelimuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan dan potensi akademik guna memberdayakan masyarakat. Lembaga perguruan tinggi adalah bagian dari anggota masyarakat untuk mencerdaskan dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Lembaga pendidikan perguruan tinggi dapat berdiri dan menyelenggarakan proses pendidikan karena mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya, sudah seharusnya proses pendidikan tidak hanya dilakukan di lingkungan akademik tetapi juga lebih luas lagi, yakni memberikan pendidikan dan menggerakkan perubahan perbaikan di masyarakat untuk membebaskan mereka dari kebodohan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Etika sebagai Landasan Kemitraan PT-Perusahaan-Pemerintah

Meskipun konsep CSR terus berjalan dan mengalami perkembangan bukan berarti bahwa konsep tersebut dapat diterima dan dipraktikkan begitu saja. Harapan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam CSR untuk dapat bersinergi dan bekerja sama dalam praktiknya tidak selalu dapat diwujudkan. Tidak jarang yang terjadi justru munculnya rasa saling mencurigai, saling mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing, sehingga terjadi resistensi di antara berbagai pihak yang seharusnya terlibat dan bersinergi dalam memujudkan CSR. Dengan sendirinya, hal itu tidak akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan CSR dan lebih jauh bagi kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan perusahaan.

Lalu, bagaimana seharusnya memaknai CSR? Apakah CSR seharusnya dipahami secara etika berdasarkan atas tuntutan dan kepentingan para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan perguruan tinggi? Jika tidak demikian, apakah diserahkan pada penafsiran masing-masing pemangku kepentingan atau diarahkan pada tujuan pembangunan masyarakat untuk kemakmuran dan keadilan sosial.

Perusahaan sebagai entitas bisnis sudah seharusnya menyadari bahwa kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari dukungan pemerintah dan penerimaan masyarakat setempat. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, perusahaan yang berkepentingan untuk mencari keuntungan haruslah membawa kesejahteraan masyarakat setempat dan pemerintah dapat memberikan peraturan yang memberikan keadilan bagi perusahaan dan masyarakat.

Kepentingan bisnis dalam jangka panjang mau tidak mau harus mempertimbangkan investasi sosial jika bisnis itu ingin tetap bertahan dan berkembang. Pelaku usaha harus melakukan tindakan moral bisnis, menaati aturan pemerintah, peduli pada sesama dan menyeimbangkan serta menyelaraskan pemenuhan kebutuhan bisnis dan sosial. Masing-masing pemangku kepentingan kiranya perlu belajar dan menyadari untuk selalu berpijak pada landasan etis tersebut.

Lebih dalam lagi, etika dapat dijelaskan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang dijunjung oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai pedoman dalam bertindak laku. Dengan demikian, etika ini berlaku baik untuk individu maupun kelompok (Hasan dan Andriyani, 7: 2015). Yang sesuai dengan etika adalah baik secara moral, sedangkan yang tidak sesuai dengan etika adalah buruk secara moral. Jika dikatakan bahwa suatu perbuatan itu kurang etis, artinya ialah bahwa perbuatan tersebut menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang diterima dalam masyarakat (Bdk. Bertens, 2003: 69). Jika dikaitkan dengan bisnis atau usaha komersial, etika bisnis dapat dipahami sebagai sikap moral untuk tidak menekankan bisnis pada upaya memaksimalkan laba semata-mata, melainkan pada upaya meletakkan segala keputusan dan praktik bisnis di atas dasar kesadaran dan moral.

Sebagai sebuah ilmu atau studi, Henningfield dkk (2006, 23) menyatakan bahwa etika bisnis dapat didefinisikan sebagai studi tentang situasi bisnis, kegiatan dan keputusan dalam menghadapi masalah benar dan salah. Evan dan

Freeman (Henningfield, 2006: 23) menjelaskan bahwa konsep dasar etika ini berpijak pada pengertian tindakan bermoral sebagai suatu *perintah* atau *imperatif kategoris*. Artinya ialah tindakan yang bermoral itu merupakan suatu perintah atau keharusan yang mutlak ditaati, tanpa syarat, tidak tergantung pada berbagai konsekuensi perbuatan (Bagus, 1996: 331). Akan tetapi, perintah ini bukanlah paksaan, melainkan sesuatu yang muncul dari pertimbangan dari dalam diri yang meyakinkan dan membuat kita tidak bisa lain kecuali taat dan bertindak menurut nilai-nilai moral.

Jika berpijak pada pengertian tindakan bermoral sebagai suatu imperatif kategoris, maka dalam konteks kemitraan CSR berbagai pemangku kepentingan haruslah memiliki kesadaran sosial, mengutamakan kepentingan sosial atau masyarakat, membela kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan keagamaan Islam sebagai basisnya, PT pada dasarnya memiliki wilayah yang strategis untuk membangun kemitraan sekaligus menanamkan nilai moral dan kesadaran kritis untuk bersama menghadirkan pentingnya kebersamaan untuk berjuang mencapai cita-cita semua orang tentang kesejahteraan dan keadilan sosial.

Perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki sumber daya ekonomi yang besar sehingga berpotensi untuk mendayagunakan kekuatan finansial mereka demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perguruan tinggi menjadi mediator dan fasilitator untuk membantu perusahaan dalam merancang dan membangun sistem kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CSR guna mencapai keberlanjutan bisnis yang mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah memiliki otoritas untuk menegakkan peraturan dan melakukan kontrol dalam usaha mewujudkan CSR hingga mendukung terwujudnya kemakmuran masyarakat. Harapan-harapan pemangku kepentingan itu memungkinkan untuk dicapai jika para pemangku kepentingan saling bekerja sama dengan jalan kemitraan antara perguruan tinggi, perusahaan dan pemerintah. Lalu, bagaimana model kemitraan dalam bingkai CSR yang seharusnya dijalankan? Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan kemitraan?

Model Kemitraan Perusahaan, Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Dalam menjalin kemitraan idealnya berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Masing-masing berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai kapasitas dan perannya

dalam masyarakat. Gambaran yang menyeluruh tentang kemitraan antara perguruan tinggi, perusahaan dan pemerintah, dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. Pola Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan untuk Masyarakat Kota/Kabupaten



(Sumber: Kartini, 2009, 116)

Dari skema tersebut terlihat masing-masing pihak yang terlibat dalam pola kemitraan mempunyai kompetensi yang saling berkolaborasi. Perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki sumber daya keuangan yang besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk program CSR yang tepat sasaran. Kemudian ada pemerintah yang berperan untuk penyediaan kebijakan *win-win solution* bagi pola kemitraan ini. Selanjutnya, pemerintah juga mempunyai program-program kemasyarakatan yang bisa disinergikan dengan program CSR perusahaan. Selain itu pemerintah memegang kunci dalam mengatur APBD yang berguna untuk pelaksanaan program kerja.

Selanjutnya, lembaga pendidikan yang dalam hal ini PT jelas memiliki sumber daya manusia dalam bidang riset partisipatoris untuk memberikan rekomendasi dan terlibat langsung dalam aksi program pemberdayaan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

SDM dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian dan pengalaman dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan.

Salah satu bidang kerja sama yang dapat dijalankan perguruan tinggi dan perusahaan adalah tentang pemetaan sosial (*social mapping*) dengan merujuk pada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) pada Bab IV. Hasil pemetaan sosial dapat dijadikan rujukan utama perusahaan dalam merumuskan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Dalam konteks hubungan kemitraan antara perusahaan dan perguruan tinggi, perusahaan mengharapkan agar program CSR bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan program antara perusahaan dengan perguruan tinggi dan pemerintah. Perusahaan memiliki komitmen dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Perusahaan memandang bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah untuk menggulirkan program CSR mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan. Misalnya program menjadi tepat sasaran dan benar-benar berguna bagi penerimanya, terbentuknya citra positif perusahaan karena dinilai peduli oleh masyarakat yang menerima manfaat program CSR tersebut.

Praktik pola kemitraan dapat dilakukan perusahaan dengan perguruan tinggi sebagai mitra. Perusahaan dapat memilih perguruan tinggi yang memiliki program serupa dengan program CSR yang sedang dijalankan, atau program yang sevisi dengan *corporate branding* yang sedang diusung, ataupun program yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, perguruan tinggi sebagai pelaksana teknis di lapangan harus mampu menginternalisasikan visi perusahaan dalam setiap tahap yang dilakukan.

Praktik Kemitraan CSR antara perusahaan, perguruan tinggi dan pemerintah dalam Tanggung Jawab Sosial (TJS)

Kemunculan industri didukung kemajuan teknologi modern secara langsung maupun tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap fisik dan non fisik bagi masyarakat sekitar. Perubahan sporadis menunjukkan sinyalemen tumbuhnya kegiatan ekonomi yang subur, namun tidak bisa menolak munculnya pergeseran nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tidak diinginkan. Hal ini perlu penyesuaian sosial bagi perusahaan dan masyarakat sekitar amat urgen, dimaksudkan tercipta hubungan 'mutualis' akhirnya menciptakan *social*

equilibrium (Tsamara, dkk: 2018). Pola jaringan mutualis bisa diciptakan tanpa mengikis kepentingan bersama, justru akan menguatkan hubungan kolektif dengan mempertimbangkan nilai etis seperti anti-ego sektoral. Menurut Fadilla, dkk (2018) menjelaskan elemen modal sosial yang kuat akan membuat kelompok tersebut juga semakin kompak. Kekompakan kelompok/aktor yang dijaga akan menguatkan solidaritas kelompok, jaringan di dalam kelompok juga terjaga dengan baik sehingga akan semakin mudah mencapai tujuan bersama.

Penelitian ini menjelaskan aktor-aktor yang mengisi pos jaringan kemitraan dalam bingkai *Corporate Social Responsibility/CSR*. Aktor pola kemitraan dalam penelitian ini melibatkan pihak perusahaan adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara, pihak pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan pihak perguruan tinggi adalah Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara merupakan pengelola pembangkit tenaga uap milik negara yang mempunyai kapasitas produksi sebesar 660 X 4 MW Nett berlokasi di Desa Tubanan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada tahun 2013, 2014 dan 2015, PLN Tanjung Jati B berhasil memperoleh predikat proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini memberikan legitimasi sosial bahwa perusahaan dikelola dengan ramah lingkungan serta menjadikan *project pilot* bagi operasional pembangkit listrik lainnya. Melalui program CSR menciptakan iklim signifikan terhadap proses bisnis yang bebas intervensi warga lokal. Maka perusahaan tidak mengherankan mempunyai label "*Beyond Compliance*" berkat kinerjanya mengelola lingkungan sekitar, disisi lain perhatian kepada keberlangsungan masyarakat sekitar menjadi kesadaran kolektif dengan kegiatan pemberdayaan.

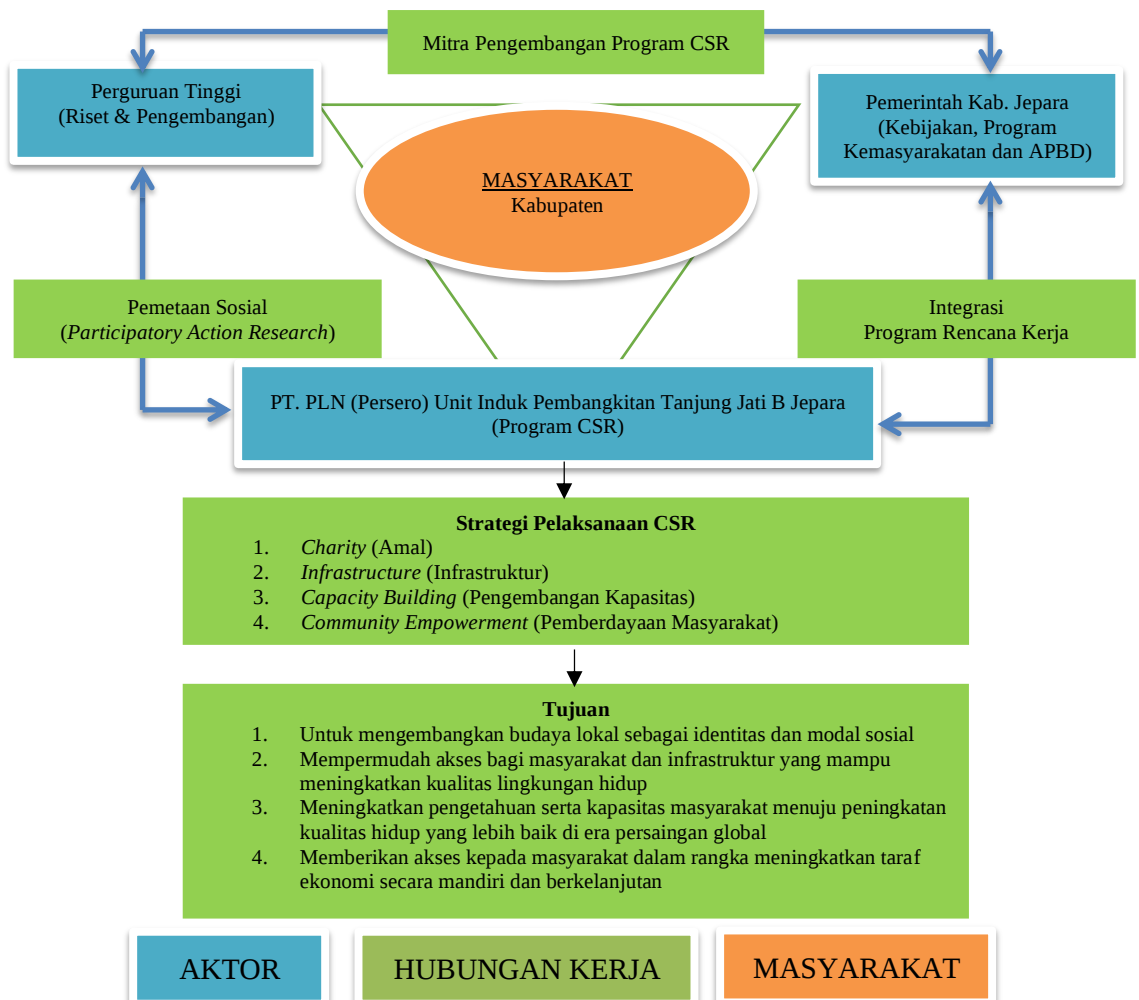
Universitas Gadjah Mada merupakan kampus ternama mempunyai reputasi nasional dan kancah internasional. Salah satu jurusan yang fokus menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan CSR adalah Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Lebih dari sedekade berkiprah menyelaraskan program CSR perusahaan agar tepat sasaran kepada penerima manfaat. Melalui program CSR perusahaan sebagai langkah realistis mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun sebelum mengawali program pemberdayaan perlu rekomendasi program yang telah disusun dalam Dokumen Pemetaan Sosial. Hal ini akan mempermudah konsep CSR yang berkembang ditengah-tengah

masyarakat dikenal hanya bagi-bagi, namun lebih dari yang dipersyaratkan perlu dilakukan pada tingkat *grassroots* sehingga modal dasar manusia (*human capital*) yang dimiliki daerah tujuan dapat mempunyai kualifikasi yang cukup untuk bekerja sesuai kebutuhan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara merupakan lembaga negara yang mempunyai otoritas mengatur, mengelola dan mengawasi seluruh hak dan wewenang termasuk operasional CSR. Maka melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebagai katalisator program, maka disusun peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Demikian ini akan membuktikan komitmen pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri, konsisten dan aktif.

Ketiga aktor tersebut mempunyai hubungan mutualis yang digambarkan dalam sebuah gambar dibawah ini:

**Gambar 2. Pola Kemitraan Tiga Aktor Dalam Bingkai CSR
(Hasil Olahan Data Lapangan)**



Menurut tabel diatas, setiap aktor mempunyai tugas dan fungsi yang saling keterkaitan satu sama lain. Masyarakat menjadi objek vital pemberdayaan didukung sinergitas antar lembaga pendidikan, lembaga daerah dan lembaga korporasi. Lembaga pendidikan yang menjadi representasi adalah Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat melibatkan multi sektoral yang berkepentingan dan komitmen tinggi adalah perusahaan, perguruan tinggi dan pemerintah daerah. PT. PLN (Persero) UIK TJB sebagai pihak perusahaan melibatkan Pemda Kabupaten Jepara dengan cara mengundang mereka dalam acara kegiatan pelatihan, seminar, perayaan Hari Listrik Nasional hingga seremonial tamu kenegaraan. Salah satu kegiatan melibatkan perusahaan dengan Pemda Kabupaten Jepara konteks pengembangan program CSR adalah komitmen kerjasama produk turunan Program Dotuman Angon.

Adapun produk yang telah dihasilkan antara lain pupuk padat organik, pupuk cair organik dan biogas. Produk tersebut diproduksi oleh kelompok ternak binaan perusahaan melalui Program CSR. Produk label organik perlu dukungan Pemerintah Daerah Jepara sebagai upaya promosi kepada masyarakat, namun sejauh ini belum punya MoU/*Memorandum of Understanding* antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Padahal posisi strategis dua aktor ini berperan penting sebagai *catalyst sectoral*.

Berbicara program CSR perusahaan seperti Dotuman Angon yang bergerak dalam bidang pertanian dan peternakan, memiliki garis struktural yang merepresentasikan kerjasama kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara. Bentuk konkret kerjasama adalah sinkronisasi program rencana kerja bagi DPP dan perusahaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wahyu Mahaputra selaku Asisten Manager CSR saat ditemui di kantor, menjelaskan:

“Program CSR harus menjadi tumpuan primer peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama masyarakat desa ring 1 perusahaan. Tentu mewujudkan mimpi yang besar tidak bisa khayal berjalan sendiri. Justru kita tetap terus bersinergi antar sektor sesuai kapasitas lembaga yang bersangkutan. Misalnya

program pemberdayaan Dotuman Angon yang didominasi para petani dan peternak karena tupoksi program mengembangkan ternak kambing. Maka lembaga yang berfungsi sebagai supporting system adalah Pemerintah Daerah atau Dinas. Wujud kerjasama yang menjadi perhatian masyarakat seperti penyelarasan program rencana kerja misalnya program kegiatan pemeriksaan ternak gratis, optimalisasi produk turunan ternak kambing, legalisasi produk hingga edukasi dunia peternakan yang sehat. Jadi program antar instansi kita selaraskan sehingga baik secara efisiensi dan transparansi” (Hasil Wawancara, 18 Januari 2019).

Senada yang telah disampaikan Sumardi sebagai Kepala Seksi Pupuk, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Jepara, menjelaskan:

“Kami bangga melihat semangat para kelompok ternak binaan PLN TJB. Semangat yang pantang menyerah ini berkat hasil kolaborasi rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Divisi CSR PLN TJB. Kami turut berterima kasih kepada PLN TJB menciptakan kondisi inklusi sosial melalui kelompok ternak binaan. Adapun hasil yang bisa dinikmati adalah hadirnya produk turunan ternak kambing seperti pupuk organik padat, pupuk organik cair dan biogas. Jangka lama melalui produk tersebut akan menciptakan Kabupaten Jepara sebagai kawasan organik lingkup pantura.” (Hasil Wawancara, 29 November 2018).

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Ketua Kelompok Ternak “Mantra 1” tentang kerjasama DKPP dan CSR PLN TJB, menjelaskan:

“Selama kelompok kami dibina oleh CSR PLN selalu disambut positif oleh anggota kelompok ternak lainnya. Antusias mereka terlihat ketika setiap tiga bulan sekali ada acara kunjungan DKPP ke kandang komunal kami. Tentunya pihak dinas memberikan pembinaan kepada kami sebagai peternak desa yang awam terhadap pencegahan dan pengelolaan penyakit ternak. Diantara penyakit ternak yang pernah kami keluhkan adalah majer (mandul) dan demam pada ternak. Pemerintah dalam hal ini

DKPP turut memberikan vaksin yang disuntikan ke hewan, agar tubuh memiliki daya imun yang kuat melawan berbagai penyakit.”
(Hasil Wawancara, 5 Februari 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sinergitas program CSR antara PT. PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B Jepara dengan Pemerintah Daerah Kab. Jepara sangat penting. Hal ini dikarenakan kedua aktor mempunyai peran yang berbeda namun tujuan sama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi sinkronisasi program kerja antar lembaga menjadi pilihan otoritatif meskipun terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang bisa diamati dari kerjasama pola kemitraan tersebut adalah terwujudnya program kerja yang terintegrasi antar aktor pruralisme kesejahteraan. Sedangkan kekurangan adalah timbul fragmen dominasi antar sektor terkait kepentingan anggaran, kebijakan bahkan pelayanan kesejahteraan.

Untuk mendukung mekanisme program CSR secara yuridis, melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang ditandatangani oleh Bupati Jepara. Adapun Undang-Undang ini terdiri dari 17 bab dan total sebanyak 32 pasal. Lebih spesifik tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut pasal 11 ayat 1 menjelaskan program tanggung jawab sosial perusahaan di daerah meliputi pemberdayaan masyarakat, kemitraan usaha mikro kecil dan koperasi dan program langsung kepada masyarakat. Ayat 2 menjelaskan program dimaksud ayat (1) sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian perusahaan pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, perlu sinergitas antar sektor dalam hal ini perusahaan dan dinas terkait menyelenggarakan program kegiatan sesuai tujuan negara adalah mensejahterakan kehidupan bangsa (UUD 1945 Alenia 4).

Pilar Kemitraan CSR antara Perusahaan, Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pandangan lain mengenai hasil pola kemitraan pemerintah, perguruan tinggi dan perusahaan dalam bingkai tanggung jawab sosial perusahaan, memiliki lima poin pelaksanaan CSR (Supriatno, Thendri dalam Besse Asniwaty, 2010) antara lain: *Building Human, Strengthening Economies, Assessing Social Cohesion, Encouraging Good Governance* dan *Protecting The Environment*.

Pertama, *Building Human* adalah menyangkut kemampuan perusahaan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang andal (internal) dan masyarakat

(eksternal). Bagian sumber daya manusia internal menjadi tugas dari korporasi pusat. Sedangkan bagian sumber daya manusia eksternal menjadi tugas tiap perusahaan yang biasanya melalui kegiatan pemberdayaan (*community empowerment*). PLN TJB telah mempraktikkan konsep ini melalui program CSR tertuang dalam program rencana kerja seperti program dotuman angon, program desa wisata bondo dan program rajungan dan karang endemik pantai utara jawa. Program tersebut tercipta dari rekomendasi program dalam dokumen pemetaan sosial yang dilakukan oleh Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Serta kiat sinergi Pemerintah Daerah Kab. Jepara berkomitmen mendukung upaya program tanggung jawab sosial perusahaan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Sehingga keseluruhan program menarik perhatian masyarakat berpartisipasi mendukung ketersediaan sumber daya manusia eksternal perusahaan.

Kedua, *Strengthening Economies* adalah menyangkut kegiatan yang telah berjalan untuk memberdayakan ekonomi komunitas/kelompok. Program-program yang telah didesain dengan baik akan memunculkan efek ekonomi berkelanjutan. Misalnya program dotuman angon memiliki dampak ekonomi bagi anggotanya. Kegiatan memanfaatkan kotoran ternak menjadi sumber daya alami seperti pupuk organik padat, pupuk organik cair dan biogas. Komoditas aspek ekonomi tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kuantitas produk yang dihasilkan oleh kelompok didukung strategi pemasaran yang baik akan menimbulkan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan anggotanya. Untuk lebih jelas dibawah ini ditampilkan tabel produk program CSR yang sudah berjalan hingga tahun 2020.

Tabel 1. Produk program CSR PT PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B

NO.	NAMA PROGRAM	PRODUK	HARGA (/pcs)
1.	Dotuman Angon	- Pupuk Organik Padat - Pupuk Organik Cair - Biogas 3 kg	- Rp. 15.000/10kg - Rp. 25.000/1liter - Rp. 15.000/tabung
2.	Desa Wisata Bondo	- T-Shirt Bondo Beach - Hiasan Kaca Kerang	- Rp. 55.000/buah - Rp. 60.000/buah
3.	Juara Mik Pantura	- Kerupuk Rajungan - Petis Rajungan	- Rp. 20.000/bungkus - Rp. 25.000/botol

Sumber Data: CSR PT. PLN (Persero) UIK Tanjung Jati B Jepara

Berdasarkan tabel diatas jika mengamati daftar produk program CSR mempunyai harga yang sangat kompetitif terhadap kelayakan jual di pasaran. Peran masing-masing anggota terbilang aktif ketika mengisi forum pertemuan bulanan. Termasuk pemberian nilai harga terhadap produk mereka sebelum dipasarkan ke beberapa gerai terdekat seperti toko pertanian, toko oleh-oleh dan Rumah Kreatif BUMN (RKB) Kab. Jepara. Hal ini memiliki peluang besar bagi anggota kelompok untuk meningkatkan kekuatan ekonomi serta kemandirian sosialnya.

Ketiga, *Assessing Social Cohesion* adalah perusahaan mampu menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tak menimbulkan konflik. Program CSR sudah menjadi tuntutan dari strategi bisnis dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan yang stabil. Salah satu manfaat mengelola bisnis dengan CSR adalah menjalin hubungan tulus tanpa konflik dengan komunitas karena mereka merasakan langsung komitmen perusahaan melalui pelibatan karyawan mereka dalam mengatasi masalah sosial dalam suatu komunitas misalnya melalui *community volunteering charity program* (Kartini, 2013). Pengamatan peneliti melihat konflik perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan nampak rendah, meskipun ketika musim tertentu seperti musim kemarau. Beberapa masyarakat sekitar yang tinggal disekitar perusahaan mengalami dampak operasional perusahaan antara lain suara bising mesin uap, debu batu bara dan kualitas sanitasi yang buruk. Hal ini jika permasalahan tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan proses bisnis perusahaan terganggu. Maka komitmen perusahaan dan masyarakat dalam menjalin sinergi semakin lambat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan luntur. Lebih ekstrim akan terjadi pemboikotan oleh konsumen terhadap produk perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa atau pengrusakan infrastruktur bisnis seperti pagar, kantor, gudang oleh massa karena terjadinya kerusuhan sosial (Sulistiyani, 2004).

Keempat, *Encouraging Good Governance* adalah perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang baik. Konsep ini diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992. Mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, merupakan seperangkat peraturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal terkait hak dan tanggung jawab (Tjager, 2003).

Terkait pengaturan pengelolaan CSR di PLN TJB menampilkan terdapat Jabatan Fungsional Asisten Manager Bidang CSR. Secara struktural jabatan tersebut dibawahnya Manager Keuangan, SDM dan Administrasi (KSA) selanjutnya *top direction* adalah *General Manager*. Hal ini menunjukkan pengaturan CSR yang baik akan menyebabkan terjadinya peningkatan nilai (*value added*) dan kinerja (*performance*) perusahaan yang maksimal (Saputra, 2002).

Kelima, *Protecting the environment* adalah perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan pada dasarnya didirikan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari kegiatan proses bisnis yang dilakukan, disisi lain harus mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat program CSR dalam Program Dotuman Angon merupakan upaya strategis menciptakan pengurangan gas emisi karbon yang semakin meningkat di bumi. Berdasarkan data yang dirilis *World Resource Institue* (WRI) di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia sebagai negara penyumbang emisi karbon. Indonesia memproduksi emisi karbon sebesar 2,05 miliar ton (Arif, 2019). Salah satu riil penyumbang karbon adalah kotoran makhluk hidup seperti ternak. Di Pulau Jawa, sapi potong memberikan emisi Gas Rumah Kaca tertinggi sebesar 11.684,4 GgCO₂-e/tahun (Nurhayati dkk, 2015). Jika kondisi seperti ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup seluruh ekosistem bumi termasuk paling vital adalah eksistensi manusia. Maka dari itu melalui kegiatan penabungan biogas yang bersumber dari kotoran hewan ternak mengubah gas karbon menjadi gas bio. Salah satu manfaat biogas bagi anggota kelompok ternak bisa substitusi gas elpiji, sehingga menekan pengeluaran ekonomi keluarga yang tergantikan oleh biogas yang murah dan ramah lingkungan. Perlu dukungan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Jepara sebagai *decision maker of policy* untuk mendukung operasional biogas semakin berkembang. Pembuatan MoU atau Nota Kesepahaman menjadi langkah konkret menata laju perekonomian masyarakat dibarengi pelestarian lingkungan. Serta peran perguruan tinggi dalam mempromosikan kegiatan tersebut lingkup dunia akademisi.

C. Simpulan

Kemitraan antara PT, perusahaan dan pemerintah akan berjalan baik apabila dilakukan secara kolaboratif sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendominasi. Peran PT dan pemerintah lebih tepat jika ditujukan untuk mengembangkan prakarsa CSR perusahaan. Pendekatan ini membuka ruang

untuk saling belajar antara perusahaan dan mitra kerjanya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gagasan kemitraan merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah perusahaan dapat berkreasi dan berinovasi dengan beragam institusi lain untuk menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun tantangannya adalah pelaksanaan CSR harus menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga inisiasi CSR muncul dari dalam diri perusahaan itu sendiri, bukan sekadar dorongan eksternal semata.

CSR sebagai komitmen moral bersama antarpemangku kepentingan (perusahaan, pemerintah, PT) akan berlangsung apabila ada sebuah pemahaman yang sama antarpemangku kepentingan untuk berpihak, membela kepentingan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjaga keberlanjutan bisnis. Pada tahap ini etika menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam memandu berjalannya kemitraan PT, pemerintah dan masyarakat untuk bersama mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Andi. 2019. *Indonesia Negara Penyumbang Gas Emisi CO2 Nomor 6 Terbesar di Dunia* <https://badungkab.go.id/instansi/dislhk/bacaartikel/173/Indonesia-Negara-Penyumbang-Gas-Emisi-CO2-Nomor-6-Terbesar-di-Dunia.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2020.
- Asniwati, Besse. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*. Politeknik Negeri Samarinda: Jurnal Eksis Vol.6 No.1, Maret 2010: 1267-1266. Diakses melalui www.karyailmiah.polnes.ac.id pada 20 Januari 2020.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bowen, Howard R. 1953. *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper & Brother.
- Fakih, Mansour. 2011. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hasan, Saipullah. Andriany, Devy. 2014. *Pengantar CSR, Sejarah, Pengertian dan Praksis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hennigfeld, Judith, Pohl Manfred, Tolhurst Nick. 2006. *The Icca Handbook On Corporate Social Responsibility*. England, John Wiley & Sons Ltd.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Krisdyatmiko. *Kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat Dalam Bingkai Forum Multi Stakeholders Corporate Social Responsibility (MSH-CSR) dalam Susetawati*. 2012. *Corporate Social Responsibility Komitmen Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Midgley, James (ed.). 2009. *The Handbook of Social Policy*. London: Sage Publication.
- Muthuri N. Judy, Gilbert Victoria. 2010. *An Institutional Analysis Of Corporate Social Responsibility In Kenya*. Journal Of Business Ethic.
- Nurhayati IS dan Widiawati Y. 2017. *Emisi Gas Rumah Kaca dari Peternakan di Pulau Jawa yang Dihitung dengan Metode Tier-1 IPCC*, Bogor: Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Diakses melalui DOI:<http://dx.doi.org/10.14334/Pros.Semnastpv-2017-p.292-300>
- Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsibility, Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmatullah dan Kurniati, Trianita. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Saputra, Imam dan Amin Widjaja. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta: Havarindo.

- Shaw, HW. 2009. *Marxism, Business Ethics, and Corporate Social Responsibility*. Journal Of Business Ethics, 84:565-578.
- Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susetiawan. 2012. *Corporate Social Responsibility Komitmen Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Tjager, Nyoman I dkk, 2003. Dalam Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, SH., M.Hum. Dalam Tim Editor Joni Emirzon dkk, 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press.
- Tsamara, Y.N, Raharjo, S.T, Resnawaty, R, 2018, *Strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Pertamina Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Pertamina Sehati*, Vol. 8, No.2, Hal. 219-224, *Social Work Journal* Universitas Padjajaran: Bandung. Diakses melalui DOI: <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20083> pada tanggal 21 Januari 2020.
- Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SIARAN LAYANAN PUBLIK RADIO MAYANGKARA FM KOTA BLITAR

Rendi Panju

Universitas Dr Soetomo

redipanju@gmail.com

[Abstrak: *This study wanted to know and dig deeper about Mayangkara Radio interactive broadcasting program to improve public services in Blitar City with case study of the Lang Lang Kota from Radio Mayangkara FM Blitar. This is behind Lang Lang Kota as the pioneer of interactive broadcasting in Blitar which has been able to survive until now by presenting the concept of citizen journalism. This type of research is qualitative research with a case study method. The method of data collection is done by conducting observations, interviews and documentation. The results showed that the Lang Lang Kota interactive broadcasting program was a public space while maintaining neutrality in its broadcasts. Participation, public awareness of public services and reciprocity provided by institutions or public service providers become the main force in the Lang Lang Kota interactive broadcasting. In accordance with its slogan, critically solutive, Lang Lang Kota responds to a variety of information and cases that are delivered critically and seeks solutions. Radio Mayangkara through Lang Lang Kota also educates the public in expressing opinions or criticizing a problem according to journalistic rules because it is part of the function of the mass media]*

[Penelitian ini ingin mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai program siaran interaktif Radio Mayangkara untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Blitar dengan studi kasus program Lang Lang Kota Radio Mayangkara FM. Hal ini dilatarbelakangi Lang Lang Kota sebagai pelopor siaran interaktif di Kota Blitar yang mampu bertahan sampai saat ini dengan menghadirkan konsep *citizen journalism*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program siaran interaktif Lang Lang Kota merupakan ruang publik dengan tetap mengedepankan netralitas dalam siarannya. Peran serta, kepedulian masyarakat terhadap layanan publik dan timbal balik yang diberikan instansi atau lembaga penyedia layanan publik menjadi kekuatan utama dalam siaran interaktif Lang Lang Kota. Sesuai dengan slogannya kritis solutif, Lang Lang Kota menanggapi berbagai informasi dan kasus yang disampaikan dengan kritis dan mengupayakan adanya solusi. Radio Mayangkara melalui Lang Lang Kota juga mengedukasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau mengkritisi sebuah permasalahan.]



Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

(<http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/>) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as specified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

Keywords: *Interactive Broadcasting, Public Sphere, Public services, Lang Lang Kota, Radio Mayangkara*

A. Pendahuluan

Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan negara dan masyarakat. Melalui media, beragam informasi, opini, gagasan dan kritikan atau masukan saling dipertukarkan. Dengan adanya sharing informasi dan aspirasi tersebut, media diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bernegara sehingga menjadi ruang yang potensial untuk menegakkan demokrasi. Beragam persoalan yang dihadapi media massa sebagai ruang publik menjadi salah satu tolak ukur dalam kehidupan demokrasi sebuah negara .

Kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Hak dasar tersebut harus terpenuhi dan dilindungi dari berbagai intervensi atau kepentingan. Untuk menyampaikan aspirasi inilah warga negara membutuhkan sarana komunikasi yaitu sebuah ruang publik yang mampu menjadi wadah bagi opini maupun kritik mereka terhadap berbagai permasalahan. Pentingnya ruang publik diutarakan oleh Jurgen Habermas, seorang filsuf dan sosiologis dari Jerman yang menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran yang penting dalam proses demokrasi di setiap negara. Ruang publik memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan komunikasi antar warga itu sendiri¹.

Menurut McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theories*, ada enam perspektif dalam melihat peran media². Pertama melihat media massa sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau media

¹ F.B Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

² Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage, 2000, 66.

merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa. Kedua, media juga sering dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Sehingga para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian, media hanya sebagai refleksi fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, *angle*, arah dan *framing* dari isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Ketiga, memandang media massa sebagai *filter*, atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk *content* yang lain berdasar standar para pengelolanya. Disini khalayak “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian. Keempat, media massa seringkali pula dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau *interpreter*, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam. Kelima, melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Keenam, media massa sebagai *interlocutor*, yang tidak hanya sekadar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.

Melalui siaran interaktif itulah radio siaran sebagai komunikasi massa memiliki potensi membangun jaringan partisipasi pendengar dalam mendiskusikan isu-isu yang menyangkut kepentingan public. Hal itulah yang pada masa pemerintahan Orde Baru (1970-1989), radio memiliki peran penting dalam menyebar luaskan ide-ide baru, khususnya di bidang pertanian. Radio memiliki fungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Di era komunikasi digital, peran itu tetap ada

dengan system siaran konvergensi, yang antara lain ditandai lebih dominannya peran khalayak dan sebaliknya meluruhnya peran negara dalam pengendalian informasi³.

Melihat peran penting media massa khususnya media radio bagi negara demokrasi, penelitian ini mengambil fokus pada siaran interaktif program Lang Lang Kota yang disiarkan oleh Radio Mayangkara. Saat pertama kali mengudara pada tahun 1987, lembaga penyiaran swasta pertama di Kota Blitar Jawa Timur ini memilih format sebagai radio hiburan kemudian pada tahun 2000 beralih format menjadi radio *news interaktif*. Perubahan format itu dilatarbelakangi kondisi sosial politik Indonesia pasca reformasi. Masyarakat semakin sadar akan haknya, menuntut kebebasan dalam berpendapat yang selama Orde Baru terbelenggu dan merekapun lebih menginginkan transparansi terhadap pelayanan publik.

Program siaran Lang Lang Kota Radio Mayangkara FM adalah program siaran utama yang dirancang sebagai ruang publik bagi pendengar (masyarakat) untuk menyampaikan informasi ataupun keluhan terkait pelayanan dan prasarana publik juga permasalahan lainnya. Menurut Haji Hariyanto yang merupakan pemilik Radio Mayangkara, keberadaan Lang Lang Kota mencontoh keberhasilan Program Kelana Kota Radio Suara Surabaya. Diharapkan melalui program Lang Lang Kota mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Blitar dan sekitarnya dalam menyampaikan aspirasi, informasi dan opini terkait pelayanan publik yang diperolehnya.

Lang Lang Kota merupakan program siaran interaktif melibatkan penyiar, *gatekeeper*, narasumber, khalayak atau pendengar dengan berbasis jurnalistik radio. Dalam kegiatan kepenyiaran tersebut, terdapat 14 orang personil yang bertugas sebagai penyiar dan *gatekeeper*. Rata-Rata dalam satu hari seorang penyiar akan bertugas selama dua jam sebagai *gatekeeper* dan dua jam selanjutnya sebagai penyiar. Dengan tujuan sebelum memandu Program Lang Lang Kota, semua penyiar telah menguasai topik yang muncul dan beragam persoalan yang disampaikan masyarakat. Yang tidak kalah penting peran dari masyarakat yang bergabung dalam Program Lang Lang Kota (LLK), mereka berfungsi sebagai pendengar atau *reporter*

³ R Panuju, *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup, 2018, 133.

yang secara sukarela menyampaikan informasi atau pengaduan terkait pelayanan publik yang tak berjalan sebagaimana mestinya.

Selama melakukan observasi, penulis melihat program LLK mendapat sambutan baik dari masyarakat. Lang Lang Kota yang mengudara sejak pukul 06.00-21.00, menjadi tempat orang saling berinteraksi dan menanggapi setiap persoalan mulai dari masalah politik, ekonomi, kriminalitas, isu-isu sosial, budaya, layanan publik dan sebagainya. Pada saat bertugas, para penyiar memberikan topik kemudian pendengar bisa menyampaikan pesan berupa argumen, kritik, ataupun gagasan terkait dengan topik yang sedang dibicarakan melalui telepon atau media sosial berupa whatsapp, instagram atau facebook Radio Mayangkara baik secara *on air* atau hanya menyampaikan pesan melalui *gatekeeper*. Selain itu masyarakat juga bebas untuk berinteraksi menyampaikan informasi kepada penyiar seperti dalam konsep *citizen journalism*. Dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik tersebut baik penyiar ataupun *gatekeeper* harus melakukan *check and recheck*, verifikasi data, dan akurasi data dari para pendengar. Edukasi pada masyarakat juga disampaikan melalui kalimat seperti “*Yes Fakta No Hoax*”.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk penyajian program siaran interaktif Lang Lang Radio Mayangkara FM dan proses komunikasi yang terjadi antara masyarakat dan lembaga/instansi publik untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Blitar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁴. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dianggap paling tepat dalam memaparkan

⁴ L.J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, 6.

program siaran interaktif sebagai ruang publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Blitar dengan studi kasus Program Lang Lang Kota Radio Mayangkara FM Blitar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah rekaman arsip, wawancara, observasi langsung. Hal ini dilakukan karena dianggap paling relevan sebagai teknik pengumpulan data utama dan menjadikan lainnya sebagai pendukung. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang terkumpul melalui tahap seleksi dimana data dipilih yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta dihubungkan dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini metode pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dimana peneliti akan melakukan pengamatan di lapangan (observasi), wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti, peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama melalui kegiatan wawancara mendalam.

C. Diskusi

Profil Program Lang Lang Kota Radio Mayangkara FM

Radio Mayangkara merupakan salah satu radio swasta terbesar di Kota Blitar yang tergabung dalam jaringan bisnis Mayangkara Group. Berdiri pada tanggal 3 Juli 1987 sebagai Radio Siaran Non pemerintah atau (RSNP) pertama di Blitar yang beralamatkan di Jalan Ciliwung 32A Kota Blitar Jawa Timur. Nama Radio Mayangkara berasal dari cerita pewayangan Ramayana. Dikisahkan pada masa itu Resi Mayangkara adalah penjelmaan dari Hanoman (seekor kera putih). Hanoman dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani, tokoh yang paling panjang usianya karena hidup dari zaman Ramayana sampai Mahabarata. Selain dari kisah pewayangan, Mayangkara juga diambil dari nama Kuda Putih tunggangan Mayor Djarot Soebyantoro. Mayor Djarot adalah pemimpin pasukan/batalyon 503 saat agresi militer Belanda pada tahun 1946 di Lamongan, Jawa Timur. Kuda putih menjadi

lambang kesatuan Batalyon 503. Atas dasar alasan tersebut dan saran dari Soeroto yang merupakan ahli bahasa Jawa sekaligus tokoh masyarakat Blitar sehingga Haryanto memilih nama Radio Mayangkara.

Masa kejayaan Radio Mayangkara terus berlanjut dengan melahirkan produk-produk acara unggulan radio diantaranya Galih Ratna, Rockarama, Pantun Berjoget, Gempil, dan Kejarama. Bahkan di tahun 1993 Radio Mayangkara menjadi radio swasta pertama yang berani membuat program berita produksi sendiri, diantaranya Lintas Kabar Mayangkara (Lintarama), Pilihan Kabar Minggu Ini (Pilar Mini), dan Rona Desa (Ronde).

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, agar lebih memberikan kepuasan pendengar, pada tahun 2000 Radio Mayangkara beralih mengudara pada *Frekuensi Modulasi* (FM). Momen itu bertepatan pasca lengsernya era orde baru dan munculnya era reformasi, dimana masyarakat lebih menginginkan transparansi dan kebebasan dalam berekspresi atau berpendapat. Peristiwa itu pun mendorong Radio Mayangkara tampil dengan karakter siaran baru dan beda, format radio berita “*news interaktif*” dengan label “Lang Lang Kota”

Dengan demikian, format siaran request (salam dan musik) ditanggalkan berganti menjadi format *news interaktif*. Pergeseran ini dianggap sebagai strategi yang tepat mengingat industri media dan hiburan terus berkembang dengan kehadiran internet. Program Lang Lang Kota (LLK) pun bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah agar memposisikan diri sebagai media massa yang kritis dan solutif terhadap permasalahan di Blitar Raya dan sekitarnya. Perubahan format juga membawa konsekuensi pada strategi dalam pengemasan konten acara agar tetap menarik minat pendengar dan para pengiklan.

Dengan segmentasi usia pendengar pada *range* 20 tahun ke atas Radio Mayangkara juga memutar lagu-lagu hits mulai dari *oldies* sampai lagu hits terbaru. Selain kekuatan berita lokal dan nasional, lagu merupakan kekuatan radio untuk menarik pendengar sehingga para pemasang iklan tertarik untuk memasang iklan di radio tersebut. Sebagai radio swasta, iklan menjadi penopang bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Berbagai produk iklan yang disajikan diantaranya iklan produk komersial dari perusahaan swasta baik lokal maupun

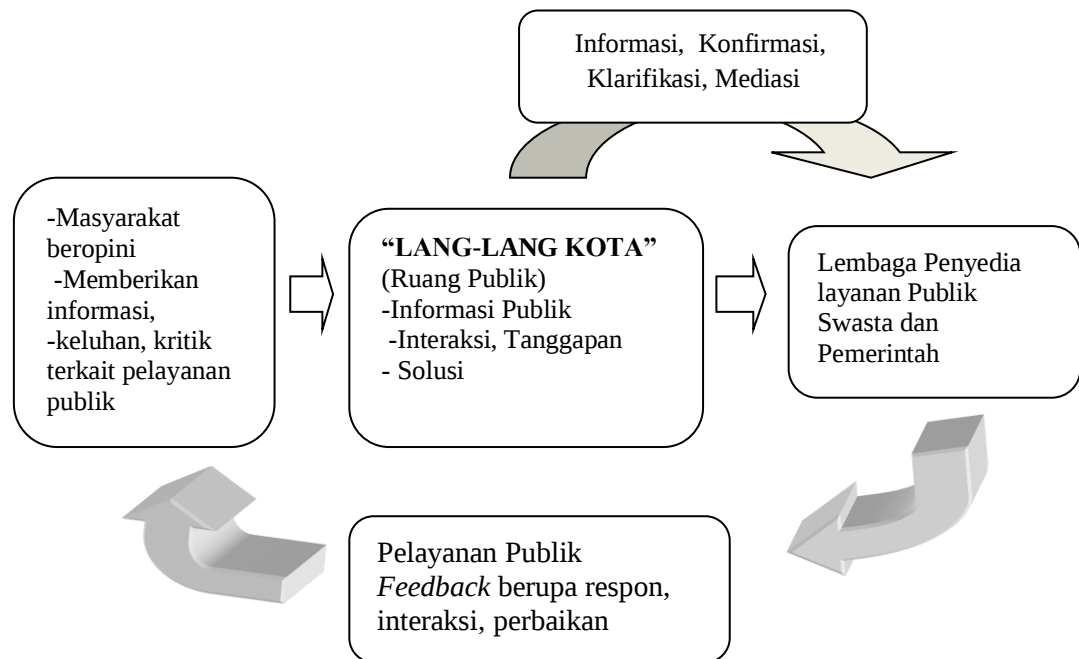
nasional dan iklan berisi informasi yang berasal dari instansi pemerintahan Blitar Kota dan Kabupaten dan sekitarnya.

Sebagai program utama atau unggulan Lang Lang Kota (LLK) mengudara sejak pukul 06.00-21.00. Dalam setiap siarannya, para penyiar memberikan topik (aktual, hangat, sedang menjadi pembicaraan) baik dalam skala lokal maupun nasional, kemudian pendengar bisa menyampaikan pesan berupa argumen, kritik, ataupun gagasan terkait dengan topik yang sedang dibicarakan melalui telepon atau media sosial berupa whatsapp, instagram dan Facebook mayangkara. LLK juga mengandalkan kekuatan *citizen journalism* yang mana warga sebagai *informan* atau reporter. Hal ini sekaligus mengatasi keterbatasan penyiar atau *gatekeeper* dalam menjangkau semua informasi.

Menghadapi era digital, Radio Mayangkara pun menghadirkan berbagai terobosan dan kreativitas dalam penyajian program LLK, seperti *live facebook*, *instagram*, *konten vlog* dan sebagainya. Namun kreativitas tersebut tetap sesuai dengan kaidah jurnalistik dan fungsi media. Berkaitan fungsi informasi, Radio Mayangkara juga mengemas beberapa paket berita diantaranya Jurnal Warta berisi rangkuman liputan reporter dan editorial redaksi yang disiarkan pada pukul 06.00-08.00. Kemudian pada pukul 06.30 liputan *live* reporter dari pasar-pasar yang ada di wilayah BLitar yang diberi nama Kabar Pasar, untuk mengabarkan fluktuasi harga sembako di wilayah Blitar Raya. Ada juga Info Kriminal dan Hukum yang merupakan rangkuman liputan reporter untuk kejadian-kejadian yang berada di ranah kriminal dan hukum. Acara tersebut disiarkan pada pukul 08.00 dan 20.00.

Tak ketinggalan ada juga paket berita yang diberi nama Jaring Informasi Mayangkara Group (JIM) yang berisi liputan reporter Mayangkara Radio Group wilayah Blitar dan Tulungagung dan disiarkan minimal lima kali dalam sehari bahkan bisa lebih jika ada peristiwa terkini. Ada juga Lang Lang Kota Hari ini sebagai rangkuman informasi yang telah disampaikan pendengar Mayangkara pada Program Lang Lang Kota. Up date informasi tiap menit ke 45 dalam paket berita Lintas Informasi Mayangkara (LIM) dan Tahukah Anda tiap menit ke 30. Selain paket-paket berita tersebut juga terdapat dialog non komersial dan dialog bersponsor.

Beragam paket berita tersebut bertujuan untuk semakin menguatkan peran Radio Mayangkara sebagai radio kontrol sosial sekaligus mendorong partisipasi masyarakat (*citizen journalism*) dalam program Lang Lang Kota untuk meningkatkan layanan publik yang berkualitas di wilayah Blitar dan sekitarnya. Berdasarkan pemaparan diatas, berikut ini alur dari Operasional Siaran Lang Lang Kota Radio Mayangkara FM :



Analisis Bentuk Ruang Publik Pada Siaran Interaktif Lang Lang Kota Radio Mayangkara FM

Ruang publik sesuai pemikiran Habermas⁵ adalah ruang dimana perdebatan kritis tentang kepentingan publik yang terkait hubungan negara dengan masyarakatnya terjadi. Perdebatan itu terjadi jika kekuasaan di dalam ruang publik terdistribusi dengan merata pada anggota-anggotanya, tidak ada dominasi kekuasaan dan setiap orang dapat mengekspresikan pemikirannya. Tanpa kehadiran ruang

⁵ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*. (trans) Thomas Burger, Britain: Polity Press, 1989.

publik komunikasi antara masyarakat dan pemerintah akan terhambat. Ruang publik dapat terwujud melalui media massa. Hal tersebut menjadi bagian dari proses demokratisasi dan penguatan *civil society* yang menjembatani hubungan antara rakyat dan pemerintahan. Fungsi media dalam ruang publik hanya akan maksimal jika media bersifat independen, tidak ada pengaruh atau intervensi dari siapapun.

Perwujudan ruang publik pada Radio Mayangkara FM melalui Program acara Lang Lang Kota (LLK) lahir dari keinginan untuk terus bersuara tentang apa yang terjadi di kota Blitar dan sekitarnya. Siaran interaktif LLK menggambarkan adanya interaksi antara penyiar dengan pendengar, penyiar dengan narasumber bahkan bisa berlangsung secara bersama-sama antara penyiar, pendengar dan narasumber. Dalam siaran *live interaktif*, pendengar ikut terlibat atau berperan aktif dalam memberikan informasi. Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dan observasi langsung, konsep *citizen journalism* yang telah diterapkan sejak awal terbentuknya Lang Lang Kota sebagai ruang publik sangat efektif untuk menarik *audience* sebanyak-banyaknya dan membuat masyarakat lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, termasuk tentang kualitas pelayanan publik. Konsep *citizen journalism* dapat dikatakan berhasil ketika pendengar bersedia untuk menyampaikan berita tersebut baik *on air by phone / GSM online* atau pun melalui *Sort Message Service* (SMS), *whatsaaap*, facebook atau Instagram.

Dalam siaran interaktif tersebut tidak hanya antara penyiar dan pendengar, juga terjalin komunikasi antara antara penyiar dengan narasumber. Narasumber berasal dari tokoh, instansi terkait pelayanan publik/swasta, LSM, dan sebagainya. Narasumber bisa datang ke studio atau hanya melalui jaringan telepon, hal ini disesuaikan dengan situasi dan kebutuhannya. Jika diperlukan dalam kasus tertentu dapat mempertemukan narasumber dan pendengar untuk *on air*, dengan menggunakan fasilitas *telephone hybrid*. Dalam siaran interaktif LLK ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan penyiar dan *gatekeeper* sebagai ujung tombak siaran interaktif LLK sebagai berikut:

1. Sebelum bertugas, Penyiar harus memiliki topik siaran yang disebut *rewrite*, bisa didapatkan dari informasi masyarakat, internet, dan berita reporter. Penyiar juga harus mengetahui perkembangan informasi yang sudah terdata di ruang *gatekeeper*, menyampaikan *up date* informasi dan mampu membawakan *live interaktif* baik dengan pendengar ataupun narasumber
2. *Gatekeeper* harus selalu mencatat dan mendata informasi yang masuk ke lang lang kota, *up date* informasi, klarifikasi, konfirmasi dan berkomunikasi dengan penyiar. Setelah selesai bertugas juga
3. mengkomunikasikan tugas berikutnya pada *gatekeeper* selanjutnya.
4. Bagi semua petugas *gatekeeper*, saat menerima telepon kata kunci yang disampaikan "Salam...Nama (Radio Mayangkara)..ada yang bisa kami bantu", kemudian menanyakan nama alamat penelpon, maksud dan tujuan yang ingin disampaikan, ketika menutup telepon jangan lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan salam.

Sebagai radio *news interaktif*, para penyiar dan *gatekeeper* juga harus menyesuaikan diri, terutama dari segi kemampuan dan wawasan, karena mereka harus mengetahui beragam permasalahan terkait pelayanan publik di wilayah Blitar dan bersinergi dengan instansi atau lembaga penyedia pelayanan publik. Keberhasilan media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada tiga pilar utama yang dimiliki setiap media penyiaran, yaitu teknik, siaran dan administrasi⁶. Maka eksistensi sebuah radio tidak terlepas dari program dan penyiar radio. Menurut Romli penyiar adalah orang yang bertugas membawakan atau memandu acara di radio, penyiar menjadi ujung tombak radio dalam berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan pendengar⁷. Sebagai pilar utama dalam media penyiaran, maka penyiar harus bisa membawakan acara atau program radio dengan baik, karena inilah kunci kesuksesan sebuah program sehingga menarik minat pendengar. Bahkan seorang penyiar menjadi *icon* radio karena ciri khas yang dimilikinya dan mudah dikenali oleh pendengar.

Poin berikutnya mengenai bahan pembicaraan atau tema yang akan diangkat dalam siaran LLK. Sesuai dengan kebijakan redaksi LLK harus mengutamakan topik yang aktual-hangat sedang terjadi, memiliki *news value* dan kelokalan yang kuat,

⁶ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio, dan Televisi*, Jakarta: Kencana, 2011, 133.

⁷ Asep Syamsul M Romli, *Dasar - Dasar Siaran Radio Basic Announcing*. Bandung: Nuansa, 2009, 37.

pelayanan publik, informasi ringan namun menarik dan menambah pengetahuan masyarakat, juga informasi nasional ataupun internasional, yang berdampak bagi masyarakat Blitar.

Radio Mayangkara mengalokasikan waktu siaran dengan sistem *block time*, pergantian penyiar setiap dua jam sekali. Pada jam *prime time* radio, pagi misalnya antara jam 06.00-10.00, topik yang disampaikan penyiar sangat berpengaruh terhadap ramai atau tidaknya komentar ataupun tanggapan dari pendengar pada jam-jam siaran berikutnya. Hal tersebut didukung adanya Paket Berita Bincang Pagi yang tayang pada jam 07.30-07.45. Bincang Pagi adalah siaran interaktif *by phone* antara narasumber dengan penyiar yang berisi topik terhangat, aktual, menjadi perbincangan masyarakat baik dari lokal Blitar maupun nasional. Kondisi arus lalu lintas dan cuaca menjadi tema wajib bagi para penyiar dalam siaran interaktif Lang Lang Kota untuk menyapa para pendengarnya. Selain itu ada tema khusus yang diangkat sebagai topik siaran, berikut beberapa contoh isu-isu terhangat yang muncul pada jam prime time 06.00-10.00 pada tanggal 26 Desember 2019 - 04 Januari 2020.

Tabel 1: Aduan dan Informasi Lang lang Kota

(Sumber: Laporan Masyarakat LLK)

TANGGAL	TOPIK SIARAN
26 Desember 2019	Tes Psikologi untuk Penerbitan SIM, Pengamanan Jelang Tahun Baru
27 Desember 2019	Razia miras di Kebon Rojo dan TMP. Penambahan videotron di Kota Blitar, menelan anggaran hampir 1,5 Milyar
28 Desember 2020	Razia miras di sejumlah toko dan warung di Blitar, Jalan rusak dan berlubang padahal baru dibangun di Kota Blitar
29 Desember 2019	Kekerasan seksual terhadap anak, Penyegelan tempat karaoke yang menjual miras tanpa izin
30 Desember 2019	Bangunan Pasar Kanigoro, kios bocor sebelum ditempati, Harga sembako jelang tahun baru
31 Desember 2019	Menghadapi cuaca ekstrim, Pembangunan Fiber Optic di Kota Blitar membahayakan pengguna jalan, Pemadaman Listrik

01 Januari 2020	Banjir Ibukota, Antisipasi bencana longsor di beberapa kawasan di Blitar, Kecelakaan lalu lintas
02 Januari 2020	Penertiban Bangunan DAS di kota Blitar dan Parkir liar merajalela, Sampah, Banjir
03 Januari 2020	Tingginya angka perceraian di Blitar Raya, Kenaikan BPJS Kesehatan
04 Januari 2020	PDAM, Penertiban PKL, Konflik Natuna

Setiap topik yang disampaikan penyiar dalam siaran Lang Lang Kota sangat berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk berkomentar atau bergabung baik secara *on air* melalui telepon ataupun melalui pesan singkat di media sosial mayangkara. Namun ada juga masyarakat yang memberikan informasi baru tidak sesuai topik siaran. Semua pesan yang masuk dan penelpon yang bergabung akan diterima *gatekeeper*. *Gatekeeper* berfungsi sebagai filter atau penyaring sebelum informasi tersebut disampaikan ke masyarakat. *Gatekeeper* seringkali harus memperhalus atau merubah kalimat yang disampaikan masyarakat melalui *whatsapp* atau media sosial. Namun perubahan itu tanpa mengurangi maksud yang disampaikan pengirim tersebut dan sesuai kaidah dan etika penyiaran publik. Sementara untuk penelpon yang menyampaikan komentar *on air*, biasanya mereka telah menjalin komunikasi dengan *gatekeeper* tentang informasi yang akan disampaikan.

Sesuai dengan slogan Radio Mayangkara kritis solutif bahwa semua informasi yang membutuhkan tanggapan, klarifikasi ataupun keluhan tentang pelayanan publik, diupayakan pada saat itu juga mendapatkan respon dari pihak terkait. Hal ini menghindari sebutan Lang Lang Kota sebagai “tempat sampah” tanpa ada solusi. Meskipun faktanya masih ada juga pejabat atau instansi terkait yang kurang *kooperatif* terkesan menghindar bahkan enggan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Seperti disampaikan Kabag Pemberitaan Radio Mayangkara untuk menyikapi berbagai permasalahan yang mengemuka di “ruang publik” tentu ada hal-hal yang menjadi prioritas, misalnya terkait insiden seperti kecelakaan, kebakaran.

Namun ada juga persoalan yang belum mampu terselesaikan pada saat itu juga ketika *on air*, sehingga peran reporter untuk melakukan investigasi atau penelusuran lebih lanjut. Dalam mendalami informasi atau laporan tersebut ada dua reporter yang berperan sesuai wilayah liputan masing-masing di Kota Blitar. Koordinasi antara tim yang berada di studio dan reporter di lapangan harus dilakukan agar mendapatkan hasil maksimal.

Menghadapi persaingan di era digital, satu hal yang tetap dipertahankan Radio Mayangkara yaitu loyalitas pendengar atau masyarakat. Keberadaan *data base* pendengar bisa digunakan untuk mengetahui respon pendengar terhadap program siaran, membangun kedekatan antara penyiar dan pendengar, kepentingan acara yang bersifat *on air* ataupun *off air* karena Radio Mayangkara adalah radio swasta yang tentu berorientasi pada profit. Kegiatan itu diantaranya Wisata Tombo Ati Radio Mayangkara, Pengobatan Gratis Radio Mayangkara, Manajemen Emosional Spiritual Mayangkara (MESM).

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dalam siaran interaktif Lang Lang Kota Radio Mayangkara, masyarakat selaku pengguna layanan publik memiliki kebebasan dalam berpendapat, menyampaikan opini ataupun kritikan terhadap instansi atau lembaga penyedia layanan publik. Namun kebebasan itu harus tetap bertanggungjawab sesuai fakta dan kebijakan redaksi LKK. Seperti konsep Habermas bahwa ruang publik itu sangat penting dalam menyemai demokrasi yang menjembatani kepentingan masyarakat dan penguasa. Dalam hal ini, pemilik Radio Mayangkara dan pemimpin redaksi Lang Lang Kota menjadi ujung tombak dalam mengambil kebijakan agar media tetap memposisikan diri netral dari kepentingan penguasa.

Analisis Proses Komunikasi Antara Masyarakat dan Instansi/Lembaga Penyedia Layanan Publik Pada Siaran Interaktif Lang Lang Kota

Berdasarkan paradigma Laswell⁸ bahwa proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Proses komunikasi secara primer

⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Diantaranya melalui bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya. Pada proses komunikasi secara primer, bahasa yang paling banyak digunakan, sebab bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain, apakah itu berbentuk ide, gagasan, informasi atau opini. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan.

b. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Penggunaan alat atau sarana tersebut untuk melancarkan komunikasi karena komunikannya berada relatif jauh atau berjumlah banyak. Contoh dalam penggunaan telepon, surat, surat kabar, radio, majalah, televisi, dan banyak lainnya. Peranan media sekunder ini agar efektif dan efisien dalam menjangkau komunikan.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dan observasi pada beberapa lembaga penyedia layanan publik di Kota Blitar, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar dan Bakesbangpol dan BPD (Badan Penanggulangan Bencana) Kota Blitar. Pemilihan narasumber/ *informan* tersebut didasarkan atas informasi dari tim *gatekeeper* Radio Mayangkara bahwa rentang waktu penelitian antara Nopember 2019 sampai Januari 2020, lembaga tersebut menerima banyak laporan dan keluhan dari masyarakat. Proses komunikasi ini termasuk dalam kategori komunikasi sekunder melalui media radio. Dalam proses komunikasi masyarakat dengan lembaga/instansi pelayanan publik tersebut, Lang Lang Kota berperan sebagai berikut:

1. Forum Terbuka untuk Menyampaikan Informasi, Aspirasi, Kritik dan Tanggapan

Dalam hal siaran interaktif Lang Lang Kota (LLK) sebagai forum terbuka dalam menerima aspirasi pendengar, media publikasi, memberikan kritikan dan tanggapan terhadap beragam informasi atau permasalahan yang disampaikan masyarakat. Menurut Kabag Pemberitaan Radio Mayangkara kecepatan dan responsive dalam menanggapi apa yang disampaikan masyarakat menjadi salah satu jurus dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat pada LLK. Adakalanya sebuah persoalan tidak bisa selesai saat itu juga, karena harus melibatkan berbagai pihak. Untuk itu ada beberapa program sebagai tindak lanjut dalam menanggapi sebuah kasus atau permasalahan yang menjadi bahasan utama di LLK.

Salah satunya Fokus Potret Kita (FPK), setiap hari Kamis pukul 10.00, yang menghadirkan pihak-pihak terkait dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung menanggapi topik yang dibahas. Seperti pada bulan November 2019, Fokus Potret Kita membahas penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan PKL yang semakin merajalela di berbagai kawasan di Kota Blitar. Padahal sudah ada tempat khusus yang diperuntukkan bagi PKL. Kemudian persoalan lain yang dikeluhkan masyarakat tentang bantuan pangan non tunai. Penyaluran bantuan tersebut sering mengalami kendala dan tidak tepat sasaran. Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan ketidakpahaman warga membuat keresahan di kalangan penerima bantuan pangan non tunai yang notabene mereka adalah warga tidak mampu.

Lang Lang Kota menjadi forum bagi siapapun yang ingin menyatakan argumen dan sikap mengenai layanan publik dan berbagai permasalahan lainnya. Sebagai tempat bertemunya berbagai kepentingan media harus tetap menjaga netralitasnya. Seperti ditegaskan oleh Habermas bahwa ruang publik tersebut harus bebas dari intervensi dan ketidaktransparanan serta terbebas dari ruang negara.

2. Penanganan Laporan atau Keluhan Masyarakat oleh Instansi atau Lembaga Penyedia Layanan Publik

Adanya ruang publik pada media massa menurut Jurgen Habermas memiliki andil dalam pembentukan opini publik. Peran vital media ini seharusnya bisa dimaksimalkan oleh lembaga atau instansi penyedia layanan publik untuk mengetahui opini atau aspirasi masyarakat demi meningkatkan kualitas layanan publik. Lang Lang Kota sebagai ruang publik telah mempertemukan kepentingan tersebut. Contoh laporan atau keluhan yang muncul pada program Lang Lang Kota dan tindak lanjut yang diberikan penyedia layanan publik adalah sebagai berikut:

1. Balapan liar yang meresahkan warga

Maraknya balapan liar yang terjadi di beberapa kawasan di Kota Blitar seperti di Jl Sudanco Supriyadi atau di depan Taman Makam Pahlawan, Jalan Merdeka membuat resah masyarakat, Warga minta agar kepolisian tindak tegas mereka. Hal ini dapat dilihat dari aduan yang masuk pada LLK pada tanggal 30 Desember 2019 dan 02 Januari 2020 sebagai berikut:

“Mohon di tertibkan dini hari tadi balapan liar di depan TMP, banyak yang tidak pakai helm dan mengganggu pengguna jalan yang lain “(dari Pak Anam warga Bendogerit)

“Pak polisi, tolong ditindak tegas balapan liar, kenapa kok dibiarkan saja, saya sudah beberapa kali melihat mereka dulu yang biasanya di jalan kenari” (dari Bu Ida warga Sananwetan)

Berdasarkan informasi dari tim *gatekeeper* Radio Mayangkara, balapan liar sejak bulan Desember kembali marak terjadi di kota Blitar, Polres Kota Blitar yang menerima pengaduan itu kembali mengintensifkan razia balapan liar dan patroli. Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP Haris Dharma Sucipto melakukan razia atau Operasi Cipta Kondisi pada Minggu 5 Januari 2020 dinihari, di sekitar Jalan A. Yani & Jalan S. Supriyadi kota Blitar sering dijadikan arena balap liar. Dari 4 operasi itu polisi mendapati ada 35 *bikers* yg tengah melakukan balap liar di lokasi. Dengan kondisi sepeda motor yg di modifikasi & tidak sesuai standar. Selain sanksi pembinaan, para *bikers* itu diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Razia

itu akan rutin gelar guna deteksi dini gangguan Keamanan serta ketertiban masyarakat khususnya pada malam hari.

2. Jalan licin rawan jatuh dan kecelakaan

Pasca hujan deras yang mengguyur kawasan Kota Blitar pada hari Jumat 1 Nopember 2019 sejumlah ruas jalan di Kota Blitar licin dan membuat pengendara sepeda motor jatuh, seperti di perempatan jalan Jenderal Sudirman atau sebelah utara Polres Blitar Kota. Hal itu juga disebabkan banyak bekas buah beringin yang jatuh di aspal kemudian nempel di roda. Beberapa laporan masyarakat diterima tim *gatekeeper* LLK dan media sosial mayangkara. Peristiwa itu langsung disampaikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan ditindaklanjuti dengan pembersihan bersama Damkar Kota Blitar.

Lang Lang Kota sebagai ruang publik mendorong adanya komitmen pemerintah atau lembaga penyedia layanan publik dalam menanggapi pengaduan atau keluhan masyarakat. Komitmen itu didasarkan pada UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan tersebut maka disimpulkan bahwa program siaran interaktif Lang Lang Kota merupakan ruang publik, masyarakat bebas menyampaikan informasi, opini, keluhan, kritikan dan masukan berkaitan dengan layanan publik. Begitu juga sebaliknya bagi lembaga penyedia layanan publik dapat memanfaatkan media sebagai sarana berkomunikasi dengan warga untuk menanggapi keluhan atau pengaduan mengenai layanan publik yang telah diterima. Peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap layanan publik menjadi salah satu kekuatan dalam siaran interaktif Lang Lang Kota, dengan menggunakan model *citizen journalism*. Hal ini juga menjadi tantangan bagi tim *gatekeeper* dan penyiar sebagai ujung tombak dalam melakukan filter (menyaring) informasi atau keluhan yang disampaikan masyarakat terkait layanan publik.

Kebebasan dalam bersuara pada ruang publik Lang Lang Kota tetap harus didasarkan pada kaidah jurnalistik. Media berperan dalam mengedukasi masyarakat. Setiap permasalahan atau aduan tentang layanan publik yang muncul harus disikapi dengan kritis dan menghasilkan solusi sehingga menghindari sebutan Lang Lang Kota sebagai keranjang sampah masalah. Untuk memaksimalkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara tim pemberitaan dan tim penyiaran Radio Mayangkara. Program Lang Lang Kota menjadi contoh dari proses demokrasi lokal di kota Blitar. Keberlangsungan hal itu sangat tergantung dari netralitas redaksi Radio Mayangkara dan tidak adanya campur tangan dari penguasa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bagi institusi media, Radio Mayangkara

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pendengar, diharapkan Program Lang Lang Kota lebih kritis dan lebih gencar lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial pada lembaga/instansi publik di Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas layanan publik di kota Blitar.
2. Program Lang Lang Kota dapat bekerjasama dengan anak-anak muda untuk lebih mengencarkan lagi *citizen journalism* dengan konsep *vlog* atau melalui *instagram*.
3. Penyiar maupun *gatekeeper* sebagai garda terdepan dalam penyiaran harus lebih proaktif dan responsif dalam menyampaikan informasi dan menanggapi laporan LLK. Jika membutuhkan klarifikasi dan konfirmasi harus dilakukan dengan cepat kemudian disampaikan di udara atau *on air* karena suara adalah kekuatan radio.
4. Meningkatkan kualitas seluruh jurnalis yang ada di Radio Mayangkara dalam bidang pemberitaan dan memperkuat pengelolaan medsos mayangkara.

b. Bagi para peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya, mengenai ruang publik di media massa (radio). Dan diharapkan lebih meningkatkan ketelitian dalam kelengkapan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. (1994). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. (trans) Thomas Burger, Britain: Polity Press.
- Habermas, J. (1996). *Between fact and norm*, diterjemahkan oleh William Rehg, The MIT press, New Baskerville.
- Hardiman, F.B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L.J (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Denis. (2000). *Mass Communication Theory*. London: Sage.
- Morissan. (2011). *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio, dan Televisi*, Jakarta: Kencana.
- Panuju, R. (2018). *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Mediagroup.
- Romli, Asep Syamsul M. (2009). *Dasar - Dasar Siaran Radio Basic Announcing*. Bandung: Nuansa.
- Rochmad Effendy, "Program Siaran Interaktif (Talk Back Radio) Sebagai Ruang Publik Masyarakat Untuk Mengembangkan Demokrasi Lokal: Studi Pada Program "Citra Publika" Radio Citra 87,9 FM Kota Malang" dalam Jurnal komunikasi, Vol. 9, No 1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Oktober 2014.
- Antonius Galih Prasetyo, "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.16, No.02, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, November 2012.
- Deny Wahyu Tricana, "Media Massa dan Ruang Publik (*Public Sphere*), Sebuah Ruang yang Hilang" dalam Jurnal Aristo, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Desember 2013.

DINAMIKA GERAKAN SOSIAL DALAM MENENTANG PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KULIT

Studi Deskriptif di Kecamatan Sukun, Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang, Jawa
Timur

Awan Setia Dharmawan

Universitas Muhammadiyah Malang

setiadharmawan@umm.ac.id

Abstrak: *Studi ini merumuskan masalah tentang bagaimana dinamika gerakan dalam masyarakat Kelurahan Ciptomulyo dengan tujuan mendeskripsikan dinamika gerakan sosial dan faktor yang menyebabkannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan lokasi penelitian di Kelurahan Sukun, Kecamatan Ciptomulyo, Kota Malang. Subyek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dinamika gerakan lingkungan tersebut terjadi dalam 2 tahap; pertama pada tahun 2001 dan kedua pada tahun 2014. Gerakan pertama menjadi penyebab dinamika Gerakan sosial. Hal tersebut dipengaruhi oleh indikasi pemimpin gerakan tersebut menerima suap, anggota direkrut menjadi karyawan perusahaan, dan beberapa warga RW 2 diangkat juga menjadi pekerja di dalam perusahaan. Sedangkan pada tahun 2014, dinamika gerakan dipengaruhi oleh adanya tekanan dari internal gerakan dan dipengaruhi oleh pihak luar.*

[Abstract: *This study formulates the problem of how the dynamics of movement in the Kelurahan Ciptomulyo. The study uses a qualitative method with a descriptive approach and the research location in Kelurahan Sukun, Ciptomulyo Sub-district, Malang City. Purposive sampling technique was used to determine the subjects. Data were collected through observation, interview, and documentation. The research results are described that the dynamics of the environmental movement occur in 2 stages; first in 2001 and second in 2014. The first movement was the cause of the social movement. This was influenced by indications that the leader of the movement accepted bribes; members were recruited as employees of the company, and several residents of RW 2 were appointed as workers in the company. Whereas in 2014, the dynamics of the movement were influenced by internal pressures and influenced by outsiders.]*

Kata kunci: Pembuangan Limbah, Dinamika, Gerakan Sosial



Creative Commons ShareAlike CC BY-SA: This work is licensed under a Komunitas Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-na/4.0/>) which permits remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as you credit us and license your new creations under the identical terms as specified on the Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam and Open Access pages.

A. Pendahuluan

Keadaan lingkungan yang semakin hari semakin mendapatkan ancaman dari ulah tangan manusia juga terus menerus dirasakan oleh kita, seperti keadaan sungai yang mayoritas masih menjadi alternatif bagi setiap perusahaan untuk membuang limbah hasil produksinya secara langsung tanpa harus di olah lagi. Hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang sampai saat ini kita hadapi sebagai umat manusia yang hidup tidak lepas akan kausalitas dipengaruhi dan mempengaruhi, seperti yang disampaikan pada penelitian terkait keberlangsungan hutan di Nordic terkait dengan *sustainable risk* dan *environmental risk* (Andersson & Westholm, 2019)

Hal ini tidak lepas dari munculnya revolusi industri yang terjadi di Inggris dan Prancis sekitar abad ke-18, yang berawal dengan digantinya tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mesin dan adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian menuju perekonomian yang berbasis manufaktur, istilah *Buen Vivir* dalam konteks kasus Mirador di Ekuador (van Teijlingen & Hogenboom, 2016) atau hidup berdampingan dengan alam, muncul dalam konteks konflik air di Bolivia

Berdasarkan hal tersebut menyebabkan peralihan besar-besaran dari masyarakat desa menuju ke kota dan akhirnya menyebabkan pembengkakan jumlah populasi di daerah kota, revolusi industri sendiri menandai dimulainya era pertumbuhan ekonomi kapitalis dan revolusi industri sendiri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan. (Chan, Kahn, Scott, & Vetere, 2007)

Salah satu munculnya problem industrialisasi yang saat ini telah menjamur dan menjadi tonggak perekonomian suatu negara adalah polusi. Polusi sendiri dapat diartikan sebagai *output* dari perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. polusi sendiri terbagi menjadi polusi udara, air dan polusi tanah yang diakibatkan oleh zat-zat yang diproduksi oleh suatu perusahaan bersifat merusak, salah satu yang paling marak adalah polusi melalui air. Belum lagi terkait permasalahan perubahan iklim yang saat ini menjadi isu dunia, peran sosiolog dalam melihat perubahan

iklim (Ciplet et al., 2015), sama dengan yang disampaikan oleh (Bhatasara, 2015) melihat bahwa peran masyarakat lebih diutamakan dalam melihat perkembangan perubahan iklim yang saat ini terjadi.

Polusi melalui air ini langsung memberikan dampak yang cepat terhadap ekosistem sungai, hal ini juga berkaitan dengan keadaan tanah. Yang dimaksud adalah air yang tercemar tadi meresap ke dalam tanah yang menyebabkan keadaan tanah tersebut tidak subur, hal ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial manusia, hidup masyarakat sekitar daerah tercemar menjadi tidak tenang, kesehatan masyarakat sekitar tidak terjaga dengan baik.

Pencemaran air juga terjadi di Kota Malang, terutama di daerah aliran sungai yang berada di daerah Ciptomulyo Sukun Kota Malang. sungai ini telah tercemar oleh limbah perusahaan kulit yang di mana terdapat 2 perusahaan kulit yang satu bernama PT Usaha Loka dan yang kedua bernama PT Kasin. Menurut sumber berita kedua PT tersebut membuang limbah di kali *badek* sebelum memaksimalkan pengolahan limbah yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut.

Berdasarkan fakta lapangan yang menyebutkan bahwa PT Kasin dan PT Usaha Loka melakukan pencemaran terhadap sungai yang mengalir tepat di tengah-tengah pemukiman masyarakat ini berasal dari limbah hasil produksi penyamakan kulit, inti dari permasalahan ini adalah adanya kegiatan pencemaran lingkungan khususnya daerah aliran sungai oleh kedua pabrik tersebut. Kegelisahan masyarakat sekitar sungai *Badek* atau sungai bau dalam Bahasa Indonesia, sungai ini merupakan anak sungai Brantas yang mayoritas mengalir di daerah-daerah di Jawa Timur, dahulu sungai ini belum mendapat julukan sungai *Badek*, karena sumbernya masih asri dan jernih, tetapi setelah terjadi pencemaran hasil limbah pabrik sungai yang awalnya jernih menjadi tercemar dan menimbulkan bau yang luar biasa. Warga setempat saat ini sudah dipaksa menghirup udara yang kurang baik bagi kesehatan mereka selama kurang lebih 34 Tahun.

PT Usaha Loka berdiri sekitar 37 Tahun terlebih dahulu sebelum PT Kasin yang beroperasi tepatnya 34 Tahun atau selisih 3 Tahun berdirinya dengan PT Usaha Loka, yang dirasakan masyarakat setiap harinya telah

mencapai pada fase mengganggu baik terganggu dari segi fisik maupun dari segi non fisik, dengan adanya perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang kurang tertata dengan baik mampu memberikan dampak yang sangat terasa pada masyarakat sekitar sungai tersebut. Bagi produsen penghasil limbah membuang limbah secara langsung tanpa memaksimalkan IPAL yang ada akan berdampak positif pada segi anggaran, tetapi hal ini jauh berbeda dari konteks lingkungan, karena akan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kepala BLH Kota Malang menyatakan bahwa, hasil dari uji laboratorium itu menyebutkan bahwa hasil uji laboratorium kedua perusahaan tersebut sudah keluar, dengan hasil yang menyebutkan bahwa hasil air limbah perusahaan itu positif mencemari sungai *badek*, hal ini sungguh membuat lingkungan sekitar Malang khususnya sungai- sungai yang menjadi urat nadi satu kota menjadi tercemar

Masyarakat sekitar yang sampai saat ini mengetahui bahwa keberadaan kedua perusahaan tersebut telah mencemari sungai sekitar tempat mereka bahkan bukan hanya mencemari secara keadaan airnya tetapi juga membuat bau yang tidak sedap bagi masyarakat sekitar sungai *badek* dan hal ini yang dipertajam dengan hasil uji laboratorium BLH kota Malang, masyarakat pun ingin perusahaan tersebut segera mengelola limbah hasil produksi pihak mereka dengan efektif sebelum di buang ke sungai Kesabaran warga Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang dengan keberadaan limbah perusahaan kulit yang menimbulkan bau tidak sedap nampaknya sudah habis. Mereka merasa selama bertahun-tahun menjadi korban perusahaan milik PT Kasin dan PT Usaha Loka itu. Karena setiap hari menghirup aroma tak sedap, sungai *badek* yang harusnya bisa dimanfaatkan warga ikut tercemar.

Sudah puluhan tahun, warga Kelurahan Ciptomulyo merasakan bau tidak enak dari limbah perusahaan tersebut. Berulang kali melayangkan protes, namun selalu tidak ada penyelesaian dari perusahaan, apa yang telah dialami oleh warga Kelurahan Ciptomulyo selama ini tidak hanya berdampak terhadap kondisi lingkungan tempat mereka tinggal saja, melainkan telah berdampak pada kehidupan sosial mereka, hal ini

menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh 2 perusahaan kulit tersebut telah kemunculan permasalahan dari berbagai segi kehidupan, dalam kehidupan sosial masyarakat mengalami apa yang dinamakan dengan senasib sepenanggungan yaitu sebuah keadaan yang masyarakat alami antara individu satu dan yang lain sama.

Kejadian pencemaran lingkungan yang tak kunjung henti inilah yang membuat masyarakat sekitar geram oleh sikap industri tersebut, berawal pada tahun 2001 muncul gerakan masyarakat yang diberi nama FKPL (Forum Komunikasi Pecinta Lingkungan) yang di ketuai oleh Bapak Hariyadi motto gerakan awal ini adalah “jangan sampai kita masuk angin”, dalam artian jangan sampai ada anggota kita yang di suap oleh pihak perusahaan kulit tersebut inti munculnya gerakan pertama ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat kepada pemerintah yang seakan membiarkan saja urusan pencemaran lingkungan ini terjadi.

Sayangnya selama gerakan ini terbentuk belum ada hal-hal signifikan seperti adanya perubahan atau adanya aturan yang di hasilkan agar perusahaan lebih memperhatikan IPAL yang dimiliki, cuma sebatas melawan dengan cara yang halus, masyarakat belum sampai ke ranah pemerintah hanya sekedar rapat-rapat biasa. dan setelah gerakan FKPL (Forum Komunikasi Pecinta Lingkungan) ini berjalan kurang lebih 3 bulan, perusahaan tersebut berhasil membaca gerak-gerik gerakan FKPL yang mulai dianggap meresahkan kegiatan produksi perusahaan tersebut, dan akhirnya motto gerakan pertama yang memiliki arti jangan sampai kita di suap, hal tersebut malah di langgar oleh beberapa anggota FKPL tersebut, seperti sang ketua gerakan tersebut yaitu Bapak Hariyadi sendiri yang di bantu dalam bentuk beasiswa untuk anak-anaknya..

Berdasarkan keadaan internal gerakan yang mudah ditembus oleh perusahaan, maka tidak heran bila hal tersebut yaitu masalah diberi uang sangat mudah sekali untuk di lakukan, uang merupakan suatu alat yang sangat mudah untuk menggoyahkan individu dalam hal ini ketua gerakan FKPL sendiri yang merasakan, apabila ditanya lagi bahkan sampai perusahaan nekat memecah belah masyarakat yang satu dengan yang lain.

Gerakan yang kedua ini berawal pada awal tahun 2014 yang berakar pada inisiatif salah satu warga pendatang yang bernama Mas Rozi, dari inisiatif Mas Rozi yang merupakan warga RT 12 inilah kasus pencemaran lingkungan di daerah Kelurahan Ciptomulyo ini sedikit demi sedikit diangkat dan berharap permasalahan ini terselesaikan dengan baik, dan langsung membentuk gerakan yang baru atau gerakan yang kedua dengan nama AMCPL (Aliansi Masyarakat Ciptomulyo Peduli Lingkungan) dan di kepalai oleh Bapak Imam "Samba" sendiri, kegiatan pertama yang dilakukan oleh gerakan AMCPL adalah menemui komisi A dan komisi D mereka akan menyerahkan laporan mengenai pencemaran limbah di sungai tersebut dengan bantuan Mas Rofi'i tadi yang merupakan salah satu anggota Fraksi PAN membantu masyarakat untuk mengangkat kembali kasus pencemaran lingkungan ini teringat yang sebelumnya belum dilakukan oleh gerakan pertama.

Dampak perpecahan yang ditimbulkan oleh gerakan pertama dalam masyarakat terbentuk masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra terhadap munculnya gerakan kedua yang diinisiasi oleh Mas Rozi tersebut, hal ini terbukti pada saat melakukan rapat koordinasi jumlah warga yang datang hanya sedikit, padahal sebelumnya telah beredar sebuah form yang berisikan nama dan tanda tangan para warga untuk mendukung gerakan perlawanan ini kembali, dampak sosial dengan terpecahnya masyarakat menjadi topik yang bagus di dengar oleh pemilik perusahaan itu sendiri, yang termasuk di sini adalah gerakan kedua itu sendiri, dalam aspek sosial gerakan tersebut minim akan dorongan, minim akan dukungan dari warga asal sendiri, hal ini dikarenakan masyarakat sudah menaruh curiga bahwa gerakan kedua ini akan berakhir sama dengan gerakan pertama.

Dampak dari munculnya gerakan pertama memunculkan 2 aliran yang berada di dalam tubuh masyarakat itu sendiri, yaitu aliran yang pro dikarenakan diberi jabatan fungsional oleh perusahaan, warga yang demo dan melawan perusahaan diangkat menjadi karyawan perusahaan hingga ada yang diberi beasiswa oleh perusahaan kulit tersebut, beberapa hal ini muncul karena perusahaan melakukan intervensi terhadap keberlanjutan gerakan sosial masyarakat ini, karena merasa keberlangsungan produksi

perusahaan akan terhambat apabila gerakan sosial masyarakat ini bertumbuh kembang maka perusahaan melakukan langkah-langkah intervensi dengan cara pendekatan yang halus atau dalam bahasa umumnya perusahaan melakukan lobi-lobi terhadap kepala gerakan tersebut untuk segera memberhentikan aktivitas protes terhadap perusahaan kulit tersebut.

Sedangkan aliran yang kedua yaitu aliran yang tetap bersikukuh untuk melawan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan kulit tersebut dengan kata lain aliran yang kontra terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini bermunculan karena kedua perusahaan kulit tersebut melakukan aksi pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah hasil produksi perusahaan tanpa memaksimalkan sistem IPAL yang dimiliki, alasan gerakan yang kontra dengan perusahaan ini adalah perusahaan melanggar UU Lingkungan Hidup, masyarakat sekitar ingin bau yang dihasilkan melalui proses pencemaran ini akan sedikit demi sedikit hilang, perusahaan bertindak curang dengan tidak memaksimalkan IPAL yang dimiliki, maka gerakan ini bisa saja disebut sebagai *genuine movement*.

Teori yang peneliti gunakan adalah teori gerakan sosial menurut Macionis (Sukmana:2016,26) dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni: *Emergence* (tahap kemunculan) gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik. Beberapa gerakan perempuan dan hak asasi sipil, misalnya muncul karena penyebaran ketidakpuasan. Sementara gerakan sosial yang lain muncul sebagai kesadaran yang dipelopori oleh kelompok-kelompok kecil tentang beberapa isu tertentu, *Coalesce* (tahap penggabungan) setelah kemunculan, suatu gerakan sosial harus mendefinisikan sendiri dan mengembangkan strategi untuk menuju publik. Pemimpin harus menentukan kebijakan, memutuskan suatu taktik, membangun moral, dan melakukan rekrutmen keanggotaan baru. Dalam hal ini gerakan mungkin terlibat dalam tindakan kolektif seperti demonstrasi untuk menarik perhatian media massa dan perhatian publik. Gerakan juga dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, *Bureaucratization* (Tahap birokrasi) agar menjadi sebuah kekuatan politik, suatu gerakan sosial

harus memiliki sifat-sifat birokrasi, dengan demikian gerakan akan menjadi mapan dan *Decline* (tahap penurunan) pada akhirnya, suatu gerakan sosial akan kehilangan pengaruh-pengaruhnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti ambil adalah bagaimana dinamika gerakan sosial dalam menentang limbah perusahaan kulit? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika gerakan sosial dalam menentang limbah perusahaan kulit.

Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses suatu individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Stake (Creswell:2014,20).

Robert K Yin (2011,1) secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Ada tiga langkah dasar dalam menggunakan studi kasus: pengumpulan data, analisis, dan menulis. Hal pertama yang harus diingat tentang penggunaan studi kasus adalah bahwa kasus ini harus memiliki masalah bagi para peneliti untuk memecahkannya. Kasus ini harus memiliki informasi yang cukup di dalamnya. Di mana peneliti dapat memahami apa masalahnya dan memungkinkan dikembangkan suatu kerangka analisis untuk memecahkan misteri kasus tersebut (Bungin:2011,132).

B. Diskusi

Isu Polusi Udara dan Air (Gerakan Pertama Tahun 2001)

Masalah pencemaran air dari berbagai industri yang proses industrinya menggunakan zat-zat kimia, kini semakin meningkat di wilayah kota Malang ini. Pencemaran tersebut dapat terjadi terutama yang diakibatkan dari pembuangan limbah cair perusahaan yang tidak menangani bahan buangnya secara benar. Jika bahan buangan dari industri langsung dibuang ke luar perusahaan tanpa melalui proses pengolahan yang tepat, maka akan terjadi pencemaran air yang akan membahayakan kelangsungan hidup dan dapat pula menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk menghindari permasalahan tersebut diperlukan pencegahan dan penanggulangan secara khusus dan serius oleh berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Kebijaksanaan ini tidak saja diberlakukan terhadap perusahaan industri yang akan berdiri tetapi juga perusahaan industri yang telah berdiri.

Dalam hal ini permasalahan muncul dikarenakan adanya pencemaran yang dilakukan oleh PT Kasin dan PT Usaha Loka di sungai yang mengalir tepat di tengah-tengah pemukiman warga, pencemaran yang seakan-akan dibiarkan oleh pemerintah dan sudah hampir 34 tahun warga sekitar Kelurahan Ciptomulyo dipaksa untuk menghirup udara yang tercemar dan buruk bagi kesehatan, bau yang berasal dari limbah proses penyamakan kulit. PT Usaha Loka sendiri mempunyai 2 macam produksi yang pertama adalah pengolahan kulit dan yang kedua adalah pengolahan kayu, dari 2 macam produksi yang di hasilkan, pengolahan kulitlah yang memiliki limbah yang begitu dahsyat pencemarannya di bandingkan dengan limbah hasil produksi kayu.

PT KASIN LEATHER didirikan oleh Ichwan Zacharia sejak 1941 di kawasan kampung KASIN, di tepi sungai yang membelah kota Malang. Karena perluasan industri, oleh pemerintah ditawarkan untuk pindah ke kawasan industri di kelurahan Ciptomulyo.

Sejak April 1951, PT Kasin dipindah, diperluas dan beroperasi dengan penambahan sarana untuk menjadi exportir. Pada tahun 1975, Paul I. Zacharia melanjutkan usaha sampai saat ini.

Berdasarkan kasusnya, PT Usaha Loka dan PT Kasin melakukan penyalahgunaan terhadap kontrol limbah. Perusahaan tersebut terbukti mencemari Kali Badek di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Hal tersebut terbukti dari hasil uji laboratorium limbah kedua perusahaan tersebut positif mencemari sungai yaitu melebihi baku mutu.

Perusahaan tersebut seharusnya diberi tindakan tegas, akan tetapi Badan Lingkungan Hidup Kota Malang tidak menindaknya karena alasan yang kurang masuk akal yaitu karena perusahaan tersebut akan dibina nantinya dengan didampingi tenaga ahli. Masalah ini harus ditanggapi serius dan cepat dalam melakukan penanganannya, jika tidak, maka akan merugikan masyarakat yang tinggal disekitar Kali Badek. Masalah yang biasanya dialami yaitu seperti bau menyengat dari limbah, air kali maupun air serapan kali yang biasanya dipakai warga menjadi kotor, menimbulkan bibit penyakit yang dihasilkan dari limbah tersebut, merusak lingkungan disekitar Kali Badek.

Terjadi Diskursus Tentang Pencemaran Limbah (Gerakan Pertama Tahun 2001)

Berdasarkan permasalahan limbah di atas gerakan perlawanan masyarakat yang pertama itu terbentuk pada tahun 2001, Kejadian pencemaran lingkungan yang tak kunjung henti inilah yang membuat masyarakat sekitar geram oleh sikap industri tersebut, muncul gerakan masyarakat yang diberi nama FKPL (Forum Komunikasi Pecinta Lingkungan) yang diketuai oleh Bapak Hariyadi motto gerakan awal ini adalah “jangan ada dusta di antara kita dan jangan sampai kita masuk angin”, dalam artian jangan sampai ada anggota kita yang menerima suap oleh pihak perusahaan kulit tersebut ini munculnya gerakan pertama ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat kepada pemerintah yang seakan membiarkan saja urusan pencemaran lingkungan ini terjadi.

Sayangnya selama gerakan ini terbentuk belum ada hal-hal signifikan seperti adanya perubahan atau adanya aturan yang dihasilkan agar perusahaan lebih memperhatikan IPAL yang, namun pada gerakan pertama masyarakat berhasil duduk bersama dengan perusahaan yang menghasilkan pembangunan pipa-pipa guna mengalirkan limbah tanpa langsung ke sungai

Impact Gerakan Pertama Terhadap Masyarakat (Gerakan Pertama Tahun 2001)

Dan setelah gerakan FKPL (Forum Komunikasi Pecinta Lingkungan) ini berjalan kurang lebih 3 bulan, perusahaan tersebut berhasil membaca gerak-gerik gerakan FKPL yang mulai dianggap meresahkan kegiatan produksi perusahaan tersebut, dan akhirnya motto gerakan pertama yang memiliki arti jangan sampai kita masuk angin (terkena suap), hal tersebut malah dilanggar oleh beberapa anggota FKPL tersebut.

Dengan keadaan internal gerakan yang mudah ditembus oleh perusahaan, maka tidak heran bila hal tersebut yaitu masalah diberi uang sangat mudah sekali untuk dilakukan, uang merupakan suatu alat yang sangat mudah untuk menggoyahkan individu dalam hal ini yaitu ketua gerakan FKPL sendiri yang merasakan, apabila ditanya lagi bahkan sampai perusahaan nekat memecah belah masyarakat yang satu dengan yang lain, hal ini juga tidak terlalu jauh dengan yang namanya uang tersebut, hasil temuan lapangan bahwa masyarakat yang berada di seberang rel kereta api yaitu masyarakat RW 02 telah dipengaruhi oleh perusahaan agar para masyarakat di sana pro dengan keberadaan kedua perusahaan tersebut, dengan berbagai cara mulai diberi uang, anak-anak mereka di sekolahkan, hingga diangkat menjadi salah satu karyawan perusahaan tersebut.

Pergerakan Masyarakat II (Gerakan Kedua Tahun 2014)

Menurut informan yang peneliti temui di lapangan terkait masalah pencemaran di Kelurahan Ciptomulyo sendiri sudah termasuk permasalahan klasik hal ini merujuk pada mulai awal periode kepemimpinan Peni Suparto permasalahan ini sudah diangkat dan tetap saja tidak menemui titik terang hingga beliau menjabat sampai dua kali periode yaitu 10 Tahun menjabat

dan berakhir pada Tahun 2012 masalah ini tak kunjung selesai juga, hingga akhirnya pada kepemimpinan Moch Anton dengan slogannya peduli wong cilik masyarakat Kelurahan Ciptomulyo kembali mengangkat kasus ini dengan.

Gerakan yang kedua ini berawal pada awal tahun 2014 yang berakar pada inisiatif salah satu warga pendatang, Dari inisiatif Mas Rozi selaku pendatang yang merupakan warga RT 12 inilah kasus pencemaran lingkungan di daerah Kelurahan Ciptomulyo ini sedikit demi sedikit diangkat dan berharap permasalahan ini terselesaikan dengan baik, dan langsung membentuk gerakan yang baru atau gerakan yang kedua dengan nama AMCPL (Aliansi Masyarakat Ciptomulyo Peduli Lingkungan) dan diketuai oleh Abah Imam "Samba" sendiri, kegiatan pertama yang dilakukan oleh gerakan AMCPL adalah menemui komisi A dan komisi D mereka akan menyerahkan laporan mengenai pencemaran limbah di sungai tersebut dengan bantuan Mas Rofi'i untuk mengangkat kembali kasus pencemaran lingkungan ini.

Tepatnya pada Tanggal 21- Januari – 2014 Tiga orang perwakilan warga dari 4 RT 4, 9, 12, dan 13 yang berada di RW 01 Kelurahan Ciptomulyo ini meminta perlindungan dewan karena perusakan lingkungan dari kedua perusahaan tersebut sangat meresahkan warga. Dalam kunjungannya ke Komisi A DPRD Abah Imam "Samba" selaku ketua RT 01 RW 06 menjelaskan, sudah puluhan tahun, warga Ciptomulyo merasakan bau tidak enak dari limbah perusahaan tersebut. Berulang kali melayangkan protes, namun selalu tidak ada penyelesaian dari perusahaan."Kalau tidak percaya lihat sendiri ke sungainya, baunya sama sekali tidak enak,".

Dari pengaduan pertama kali ke Komisi A tersebut, keluhan warga ditanggapi dengan janji pemerintah Kota Malang berjanji untuk mengawal warga Kelurahan Ciptomulyo dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut yang telah cukup lama terjadi, dengan bantuan inilah masyarakat Kelurahan Ciptomulyo tidak perlu menunggu lama segera dikawal menuju BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Malang untuk mendalami kasus ini, tepatnya pada tanggal 24- Februari- 2014, Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, Jawa Timur,

mengeluarkan surat teguran terhadap dua perusahaan kulit yang diduga mencemari lingkungan. PT Usaha Loka dan PT Kasin terbukti mencemari Kali Badek di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. "Hasil uji laboratorium menunjukkan (limbah kedua perusahaan itu) positif mencemari sungai," kata Kepala Badan Lingkungan Kota Malang Bapak Nuzul Nurcahyo,

Bapak Nuzul mendesak kedua perusahaan pengolah kulit itu untuk mengelola air limbah secara maksimal. Tujuannya mencegah pencemaran sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang. Uji laboratorium atas air limbah dilakukan dua kali. Kedua hasil uji laboratorium menunjukkan air limbah yang dibuang ke sungai melebihi baku mutu. Namun Badan Lingkungan Hidup tak menindak tegas kedua perusahaan pengolah kulit tersebut, seperti menghentikan izin operasional ataupun menutup perusahaan. Alasannya kedua perusahaan akan dibina. Perusahaan pencemar lingkungan itu akan didampingi tenaga ahli untuk mengolah limbah.

Pergerakan Masyarakat Tahap II(Gerakan Kedua Tahun 2014 Proses Advokasi)

Seperti pada waktu advokasi pada tanggal 1 September 2014 yang dilakukan di gedung DPRD Kota Malang, ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi masalah ini dengan mendatangkan pengacara dari LBH yang bernama mas Wiwid Tuhu, di mana pada advokasi tersebut dilakukan diskusi antara pihak perwakilan Masyarakat Kelurahan Ciptomulyo ,LBH, dan pemerintah Kota Malang untuk mencari solusi agar permasalahan ini cepat selesai, apalagi hal ini juga didukung dengan media lokal setempat yaitu Koran Radar Malang dalam hal ini mempunyai andil mengangkat kembali kasus Pencemaran di daerah Ciptomulyo intens selama beberapa hari.

Pembicaraan berawal mulai dari sejarah hingga keluhan yang dialami masyarakat, dengan berbagai pendapat Mas Wiwid selaku dari LBH menerangkan kepada masyarakat jangan sampai bertindak anarkis dikarenakan hal itu dapat berdampak langsung kepada masyarakat apabila

perusahaan tersebut melaporkan balik ke pihak yang berwajib mengenai tindakan anarkis tersebut seperti menutup saluran pembuangan limbah perusahaan, Mas Wiwid juga menjelaskan mengenai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak dapat di gugat lagi dikarenakan perusahaan tersebut mulai ada sebelum adanya pemukiman masyarakat yang muncul di daerah sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi dan mas Wiwid juga menjelaskan mengenai pencemaran yang dialami masyarakat sekarang dengan pencemaran yang dirasakan oleh masyarakat dahulu sangat berbeda namun pada intinya sama tutur mas Wiwid Tahu selaku pengacara yang siap membantu masyarakat Kelurahan Ciptomulyo dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Track record Mas Wiwid sendiri terbilang cukup bagus dalam menyelesaikan sengketa beliau menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan di daerah Rembang dll, merasa mendapat angin segar masyarakat pun bersemangat dalam hal ini mas Rozi dan Bapak Imam “Samba” merasa *on fire* lagi untuk meneruskan gerakan pertama yang dahulu telah masuk angin dikarenakan ada oknum yang di suap oleh perusahaan yang membuat gerakan pertama terhenti di tengah jalan.

Namun setelah mengalami hal tersebut dari warga sekarang baik Mas Rozi maupun Abah Imam “Samba” kembali menggeluti bidang yang dahulu mereka tinggalkan dan hanya menunggu dari keputusan pemerintah terhadap perusahaan, yang dulunya pemerintah memberikan 3 opsi pilihan tersebut. Mas Rozi dan Abah Imam “Samba” ikut pula menunggu hasil dari ke 3 opsi tersebut, namun Abah Imam menambahkan kami tidak hanya tinggal diam saja mas kami akan tetap memantau perusahaan tersebut dalam hal ini memantau aktivitas pembuangan limbah perusahaan dan intensitas bau yang dihasilkan baik di malam hari maupun di pagi hari saat banyak aktivitas warga di luar rumah.

Impact Gerakan II Terhadap Masyarakat (Gerakan Kedua Tahun 2014)

Namun masih saja terdapat permasalahan yang khususnya di alami oleh mas rozi dan Bapak Imam. Warga sekitar rumah beliau dirasa acuh dan tidak mau untuk bergerak bersama-sama beliau hal ini

dikarenakan warga sekitar merasa kapok dengan gerakan pertama yang dahulu sempat mereka dukung namun pada akhirnya tanpa membawa hasil.

Dari pengalaman generasi pertama yang dirasakan oleh warga sekitar hal ini menjadi sulit bagi Mas Rozi dan Abah Imam “Samba” untuk menyatukan warga kembali guna mendukung aksi mereka.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang dinamika gerakan sosial dalam menentang pembuangan limbah perusahaan kulit di Kelurahan Ciptomulyo Kota Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika Gerakan

Dinamika gerakan terjadi pada dua tahap yaitu pada tahun 2001 dan 2014. Pada tahun 2001:

1. pada saat dirasa butuh untuk dibentuknya gerakan masyarakat yang berguna untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa lingkungan mereka telah tercemar oleh limbah perusahaan kulit melalui proses penyamakan kulit yang menyebabkan sungai di sekitar tempat tinggal masyarakat terjadi polusi udara dan air yang berasal dari proses pengolahan air limbah milik kedua perusahaan yang tidak berjalan dengan baik hal ini menjadikan sungai yang mengalir tepat di wilayah Ciptomulyo menjadi bau dan tercemar.
2. hal ini juga diiringi oleh adanya tokoh masyarakat yang siap membela kepentingan masyarakat. selain faktor memang dibutuhkannya gerakan untuk melawan perusahaan.
3. proses pasang dinamika gerakan tersebut juga dipicu oleh tuntutan masyarakat sekitar agar perusahaan banyak merekrut warga sekitar untuk menjadi karyawan perusahaan, karena selama ini perusahaan kulit tersebut mengambail karyawan dari luar daerah Ciptomulyo sendiri.

Selanjutnya proses pasang surut dinamika gerakan pada tahun 2014:

1. gerakan terjadi pada saat Abah Anton terpilih sebagai walikota Malang pada tahun 2014, beliau mempunyai semboyan “peduli uwong cilik” (Peduli Orang Kecil), dengan kata lain ada momentum di mana masyarakat Kelurahan Ciptomulyo untuk kembali menghidupkan gerakan masyarakatnya untuk kembali mengangkat permasalahan lingkungan yang telah lama menghantui warga masyarakat, momentum ini dirasa tepat dengan diiringi semboyan walikota Malang yang baru.

Sedangkan dalam proses surutnya dinamika gerakan masyarakat hal ini diiringi oleh kepentingan pribadi yang mempengaruhi tumbuhnya gerakan tersebut untuk tetap solid, dalam bahasa lain ada kepentingan dibalik munculnya gerakan masyarakat tersebut, kepentingan atau *Intertest* tersebutlah yang menjadikan gerakan masyarakat tersebut pecah dan mengalami proses surut. Bukan berhenti dari itu saja faktor surutnya gerakan juga disebabkan oleh kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menyewa preman-preman guna menakut-nakuti masyarakat yang ingin melawan perusahaan, hal ini sekali lagi menegaskan bahwa siapa yang punya modal bisa menguasai dan bermain seenaknya.

Dalam proses tersebut tidak hanya faktor negatif saja yang membuat gerakan ini mengalami surut, juga terdapat faktor positif yang membuat gerakan tersebut surut diantara lain terjadinya kesepakatan dari pihak perusahaan untuk meninjau kembali proses Instalasi pengolahan Air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh perusahaan, karena hal ini merupakan yang dirasa oleh masyarakat belum optimal yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain berasal dari pihak perusahaan saja permasalahan surutnya gerakan masyarakat ini, faktor kepercayaan masyarakat terhadap gerakan juga mempengaruhi keberlangsungan gerakan masyarakat untuk berdiri dan kembali memberikan suara-suara perlawanan terhadap perusahaan kulit tersebut, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, masyarakat yang enggan untuk mendukung gerakan tersebut juga memberikan dampak yang

signifikan terhadap bagaimana surutnya gerakan masyarakat dalam melawan perusahaan.

Referensi

- Andersson, J., & Westholm, E. (2019). Closing the Future: Environmental Research and the Management of Conflicting Future Value Orders. *Science Technology and Human Values*, 44(2), 237–262. <https://doi.org/10.1177/0162243918791263>
- Bhatasara, S. (2015). Debating sociology and climate change. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 12(3), 217–233. <https://doi.org/10.1080/1943815X.2015.1108342>
- Chan, A., Kahn, V., Scott, C., & Vetere, P. (2007). *Bolivian Water Wars*.
- Ciplet, D., Roberts, T., Melathopoulos, A., Dunlap, R., Ciplet, D., Roberts, J. T., & Change, C. (2015). *Wanted : More Climate Change in Sociology ; More Sociology in Climate Change (Policy)*. 145–150.
- van Teijlingen, K., & Hogenboom, B. (2016). Debating Alternative Development at the Mining Frontier: Buen Vivir and the Conflict around El Mirador Mine in Ecuador. *Journal of Developing Societies*, 32(4), 382–420. <https://doi.org/10.1177/0169796X16667190>
- Bungin B.2008.*Penelitian Kualitatif*.Jakarta.Kencana Pranada Media Group
- K.Yin.R.2011.*Studi Kasus Design dan Metode*.Jakarta PT RajaGrafindo Persada
- Sukmana.O.2016.*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*.Malang: Intrans Publishing
- W.Creswell.J.2013.*Research Design Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif,dan Mixed Method*.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

PETUNJUK PENULISAN

Komunitas menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas>.
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**

Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.

Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.

Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**

Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**

Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

- g.** Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurutan, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.
- h.** Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.
- i.** Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku: Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal: Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa: Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah: Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.